

Editor: Achmad Mukafi Niam

nuonline

FRAGMEN-FRAGMEN MUKTAMAR NU DARI ERA KOLONIAL HINGGA MILENIAL



Fragmen-fragmen Muktamar NU dari Era Kolonial hingga Milenial

Editor:

Achmad Mukafi Niam

Diterbitkan oleh:

Numedia Digital Indonesia

Fragmen-fragmen Muktamar NU dari Era Kolonial hingga Milenial

Editor:

Achmad Mukafi Niam

Tata Letak:

Nurdin

Cover:

Aceng Darta

Diterbitkan oleh:

Numedia Digital Indonesia

Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat 10430

Telp (021) 3914013, fax (021) 3914014

Kata Pengantar

Muktamar merupakan pertemuan organisasi paling akbar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ribuan orang peserta dan lebih banyak lagi, para *muhibbin* atau pecinta NU beramai-ramai datang ke lokasi muktamar. Di luar agenda resmi, terdapat acara-acara pendukung yang diselenggarakan oleh aktivis NU maupun warga NU. Semuanya bergembira ria.

Muktamar secara rutin diagendakan selama lima tahun sekali, namun pada masa awal-awal NU berdiri, muktamar pertama sampai ketujuh diselenggarakan setiap tahun pada bulan Rabi'uts Tsani. Ada periode ketika agenda muktamar tidak pasti, sampai kemudian sejak 1979, ketika Indonesia semakin stabil, penyelenggaraan muktamar semakin tertata.

Pada masa lalu, untuk menyelenggarakan muktamar dibutuhkan perjuangan yang berat mengingat kondisi infrastruktur dan teknologi yang masih sangat sederhana dibandingkan dengan saat ini. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kemegahannya. Masyarakat di setiap tempat penyelenggaraan muktamar tersebut menyambutnya dengan riang gembira. Mereka bahu-membahu membantu penyelenggaraan acara ini supaya sukses.

Muktamar juga tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, ada banyak faktor, baik karena faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebabnya. Sempat ada kubu Cipete dan Situbondo menjelang muktamar 1984 sementara pada muktamar di Cipasung 1994, terjadi tekanan kuat dari pemerintah. Dengan membaca fragmen ini, kita dapat memperoleh gambaran sedikit lebih utuh perjalanan muktamar NU dan merasakan suasana batinnya. Kita juga dapat belajar dari masa lalu supaya lebih baik di masa mendatang.

Tulisan ini sebagian besar berasal dari kanal fragmen *NU Online* yang membahas muktamar. Inisiatif untuk melakukan kompilasi

dalam bentuk buku dimaksudkan supaya materi ini lebih mudah diakses dalam bentuk pdf untuk dibaca di tablet atau e-reader. Siapapun juga dapat mencetak materi ini sejauh tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

Penulis atau editor yang ada dalam format web tetap ditampilkan dalam buku kecil ini sebagai apresiasi atas kerja-kerja kepenulisan yang telah mereka lakukan. Sebagian besar penulis adalah wartawan atau kontributor *NU Online*, sementara beberapa tulisan lain dikirim oleh para penulis di lingkungan NU. Terima kasih banyak atas karyanya, semoga dapat meningkatkan pemahaman dan memberi pencerahan terkait perjalanan organisasi NU.

Jakarta, Desember 2021

Achmad Mukafi Niam

Daftar isi

Kata Pengantar	iii
Muktamar NU dan Catatan Sejarahnya dari Masa ke Masa	1
Pertemuan Besar di NU Selain Muktamar	7
Pernahkah NU Menggelar Muktamar Luar Biasa?	13
Respons Para Kiai dan Kaum Intelektual pada Muktamar NU	15
Voorstel Pendidikan dari Menes di Muktamar Keempat	18
Kiai-kiai Jawa Barat di Awal Muktamar NU	20
Napak Tilas Muktamar NU 1930 di Pekalongan	22
Habib Ali Kwitang Berpidato di Muktamar NU Bandung 1932	26
Bagaimana NU Membiayai Muktamar di Zaman Kolonial?	28
KH Zainul Arifin dan Muktamar Ke-13 NU di Menes	32
Muktamar Ke-10 NU (1): Muktamar di Solo Ditopang Tiga Cabang	35
Muktamar Ke-10 NU (2): Syiarkan NU Lewat Radio	37
Muktamar Ke-10 NU (3-Habis): Beberapa Putusan Penting Muktamar 1935	39
Sumbangan Kiai Hasyim Asy'ari pada Muktamar Menes	42
Kiai Abdul Mannan, Wakil Klatendi Muktamar NU Tahun 1935	44
Menengok Persiapan Muktamar di Magelang 1939	49
Perempuan Asal Sunda Ini yang Pertama Kali Berpidato di Muktamar NU	51
Muktamar NU 1962 (Bagian 1)	54
Muktamar NU 1962 (Bagian Ke-2/Habis)	56
Seputar Muktamar NU di Solo	58

Muktamar NU Ke-23 dan Pengakuan Soekarno	60
Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi Pancasila di Muktamar 1967	61
Para Kiai Sepuh “Turun Gunung” Jelang Muktamar 1984	65
Gus Dur dan Panasnya Muktamar NU Cipasung	67
Peneguhan Pancasila dalam Muktamar NU 1984	70
Muktamar 1994 dan Jihad Lingkungan Hidup	72
Jejak Tremas dalam Muktamar NU	75
Kegembiraan Muktamar Ke-33 NU	78
Tok! Muktamar Ke-34 NU Tetap Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung	83

Muktamar NU dan Catatan Sejarahnya dari Masa ke Masa

Muktamar Nahdlatul Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang dilaksanakan untuk berbagai agenda, yakni mengevaluasi kinerja kepengurusan, menyusun program baru, dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya.

Dalam muktamar NU juga dibahas masalah keagamaan dalam forum yang dinamakan Bahtsul Masa'il. Mengingat luasnya permasalahan saat ini, forum bahtsul masa'il dibagi menjadi sejumlah komisi seperti *Komisi Waqi'iyah*, *Qanuniyah*, dan *Maudluiyyah* sesuai temanya.

Muktamar NU diikuti oleh kepengurusan pusat yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kepengurusan tingkat provinsi yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan kepengurusan tingkat kabupaten yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Dalam kondisi normal, kepesertaan di tingkat PWNU dan PCNU diwakili oleh lima orang yakni rais syuriah, ketua tanfidziyah, katib, sekretaris, dan bendahara. Ada juga peserta tambahan yang bisa diusulkan untuk menjadi peserta muktamar. Status peserta muktamar (*muktamirin*) terdiri dari tiga jenis yakni peserta, peninjau, dan pengamat.

Peserta terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang. Mereka berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap masalah-masalah yang berkembang di dalam persidangan. Sementara untuk peninjau juga berhak menyampaikan saran dan pendapat. Akan tetapi, tidak memiliki hak suara.

Sedangkan pengamat biasanya merupakan intelektual atau akademisi yang mengikuti jalannya persidangan dalam muktamar. Mereka mengikuti persidangan yang digelar dalam berbagai komisi sesuai dengan minat mereka.

Dalam *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren* yang ditulis oleh M. Imam Aziz disebutkan bahwa Muktamar NU pertama diselenggarakan di Surabaya pada 21 Oktober 1926, tak lama setelah NU berdiri dan tetap terselenggara di kota tersebut sampai muktamar ketiga. Pada tahun-tahun berikutnya, muktamar secara berurutan semakin ke barat, mulai ke Semarang (1929), Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), dan Jakarta (1933) yang kemudian pindah ke Banyuwangi (1934). Selanjutnya terselenggara secara acak.

Muktamar di luar Jawa pertama kali diselenggarakan di Banjarmasin (1936). Muktamar 1941 direncanakan di luar Jawa untuk kedua kalinya, yaitu di Palembang. Akan tetapi, gagal karena situasi Perang Asia Pasifik. Selama enam tahun masa pendudukan Jepang, tidak diselenggarakan muktamar. Muktamar NU pertama pasca kemerdekaan RI diselenggarakan di Purwokerto (1946).

Mengurai masalah

Tempat penyelenggaraan muktamar selalu terkait upaya NU membantu umat Islam yang mengalami masalah. Muktamar di Semarang (1929) dikarenakan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam (SI) menjadi SI putih dan SI merah yang didominasi kelompok komunis.

Demikian pula, Muktamar Pekalongan (1930) diselenggarakan setelah terjadi konflik hebat antara penduduk dan etnis Tionghoa sehingga NU merasa perlu meredamnya. Muktamar Cirebon (1931) merupakan upaya mengatasi perpecahan umat Islam dalam masalah-masalah keagamaan. Muktamar Bandung (1932) merupakan strategi pengembangan NU di wilayah Priangan.

Dari dulu sampai sekarang, muktamar NU bukan hanya acara persidangan para pengurus. Warga NU selalu memeriahkan penyelenggaraan muktamar melalui rapat umum yang dihadiri ribuan massa. Biasanya diselenggarakan di masjid besar di kota tersebut, atau di lapangan jika diperkirakan jumlah massa yang datang sangat besar. Pada kesempatan tersebut, dai-dai populer dan dihormati masyarakat tampil.

Pada muktamar pertama, rapat umum diselenggarakan di Masjid Sunan Ampel yang dihadiri tak kurang dari 10 ribu jamaah, suatu kejadian yang belum pernah dialami Surabaya. Pada muktamar kedua, rapat umum yang diselenggarakan di Masjid Sunan Ampel dihadiri puluhan ribu orang.

Muktamar ke-4 digelar di Semarang, sementara rapat umum dilaksanakan di Masjid Besar Semarang yang luar biasa meriah. Pada Muktamar Pekalongan, rapat umum dilaksanakan di Masjid Besar Pekalongan, yang mendapatkan sambutan mengagumkan.

Ketika Muktamar ke-6 digelar di Cirebon, sempat terjadi kesulitan untuk menggelar rapat akbar di Masjid Besar kota tersebut. Tetapi akhirnya dapat diatasi KH Wahab Chasbullah dengan melobi *Adviseur voor Inlandsche Zaken* di Jakarta. Muktamar ke-7 digelar di Bandung. Rapat umum diadakan di Masjid Besar Bandung dengan para pembicara ulung, di antaranya KH Wahab Hasbullah, yang akhirnya mampu menumbuhkan banyak cabang di Jawa Barat.

Berikutnya adalah Muktamar Petamburan, Jakarta Pusat. Rapat umum diselenggarakan di depan lokasi muktamar karena Masjid Besar Tanah Abang tidak muat untuk penyelenggaraan rapat. Banjarmasin sebagai penyelenggara muktamar ke-11 juga memperlakukan peserta dengan sangat istimewa. Rapat umum diselenggarakan sampai tiga kali. *Pertama*, di arena kongres. *Kedua*, di masjid besar Kota Banjarmasin. *Ketiga*, atas permintaan cabang Martapura, diadakan sekali lagi di kota tersebut.

Seluruh peserta diangkut perahu. Sementara itu, resepsi penutupan diselenggarakan di rumah hartawan Martapura, KH Abdurrahman, dengan penyelenggaraan mewah serta menurut adat asli Martapura dalam seni kasidah dan bacaan Al-Qur'annya. Acara ini meninggalkan kesan mendalam bagi peserta muktamar.

Semakin meriah

Pada muktamar di Menes Banten, penyelenggaraan semakin meriah karena sudah terbentuknya GP Ansor dan Muslimat NU yang turut serta dalam acara tersebut. Muktamar ke-14 di Magelang dihadiri hampir semua wakil organisasi seperti PB Muhammadiyah, PII, PDPP, JIB, wakil pemerintah, pamong praja, polisi, dan wakil *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* dan para priyayi. Rapat umum yang digelar di Lapangan Tidar dihadiri lebih dari 50 ribu orang.

Muktamar di Medan tahun 1956 diliputi suasana mencekam mengingat saat itu Kota Medan dikuasai Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Simbolon. Akan tetapi, dapat selesai dengan baik. Demikian pula Muktamar Cipasung (ke-29) di bawah bayang-bayang upaya intervensi penguasa Orde Baru sehingga suasana muktamar juga sangat “panas”.

Sampai tahun 1951, muktamar diselenggarakan tiap tahun, kecuali antara 1941-1946 ketika pendudukan Jepang. Tidak setiap muktamar pada masa itu dilakukan pergantian pengurus. Akan tetapi, lebih untuk membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Awalnya, penyelenggaraan muktamar menggunakan pedoman bulan Hijriyah dan ditetapkan pada bulan Rabi'uts Tsani. Jika ini dihitung dalam bulan Masehi, penyelenggaraan muktamar kurang dari satu tahun.

Karena penyelenggaraan muktamar dilakukan setiap tahun, maka sudah ditunjuk ketua NU penyelenggara muktamar yang tugasnya bekerja menyukseskan muktamar tersebut. Umumnya biaya penyelenggaraan acara ini tidak menjadi masalah mengingat dukungan masyarakat yang sangat besar.

Panitia menerima sumbangan mulai dari sayuran, kelapa, beras, sapi, kambing, kayu bakar, sampai rumah penginapan, untuk kesuksesan acara. Sering kali masyarakat tidak mau disebut namanya sebagai pemberi sumbangan karena takut riya' dan takabur, semata mata *liIlahi ta'ala*.

Setelah tahun 1951, waktu penyelenggaraan muktamar tidak terjadwal secara periodik. Tetapi melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Penyelenggaraan muktamar berjalan dalam rentang 5 tahunan setelah Muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979 sampai sekarang.

Sebagai kota kelahiran NU, Surabaya merupakan kota tempat penyelenggaraan muktamar paling banyak (6 kali), diikuti Jakarta (3 kali), Solo (3 kali), Semarang (2 kali), Bandung (2 kali), sedangkan kota lainnya baru satu kali. Sebagian besar acara muktamar diselenggarakan di pesantren dari ulama yang paling dihormati di daerah tersebut.

Kembali ke khittah

Pada Muktamar ke-13 di Menes Banten 1938, ada usulan menggemparkan agar NU menaruh wakilnya di *Volksraad* (dewan rakyat) yang menunjukkan adanya hasrat sebagian anggota untuk terjun ke politik. Usulan ditolak dengan suara 54-4 yang artinya NU memutuskan untuk tidak mencampuri politik. Tetapi bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan sesuai AD/ ART 1926 yang belum diubah waktu itu.

Muktamar ke-19 di Palembang tahun 1952 menjadi titik penting NU dengan keputusan memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri. Titik baliknya pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, dengan keputusan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi keagamaan. Sejak kembali ke khittah hingga kini, NU tetap menjadi ormas keagamaan.

Belakangan, untuk meramaikan muktamar, tak hanya digelar rapat umum. Tetapi juga terdapat bazar yang berlangsung dari awal sampai akhir muktamar yang menjual produk dan unit usaha warga NU. Juga ditampilkan berbagai macam seni islami untuk menghibur muktamirin.

Gelaran muktamar selalu dihadiri ribuan orang mulai dari peserta maupun ‘pengembira’. Tercatat Pada Muktamar NU ke-32 di Makassar (2010), jumlah muktamirin yang hadir sekitar 4.000 orang dan mencapai sekitar 8.000 orang jika ditambah dengan para pengembira.

Pewartu: Muhammad Faizin

Editor: Musthofa Asrori

Pertemuan Besar di NU Selain Muktamar

Sebagai organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama tentu memiliki sebuah forum di mana pengurus dan warganya berkumpul bersama-sama untuk membahas hal-hal terkait organisasinya.

Untuk skala besar, muktamar menjadi forum permusyawaratan tertinggi NU yang dihadiri oleh banyak massa mulai dari pengurus dari segala penjuru Indonesia dan juga dunia sebagai muktamirin (peserta muktamar) dan juga warga NU sebagai *muhibbin* (para pecinta NU).

Selain Muktamar NU yang dilaksanakan untuk membahas berbagai agenda organisasi dan juga memilih kepengurusan baru, ada beberapa pertemuan besar lain yang digelar oleh Nahdlatul Ulama.

Di antaranya adalah Rapat Akbar, Munas Alim Ulama, dan Konferensi Besar. Berikut catatan sejarah pertemuan-pertemuan besar di NU yang tertulis dalam *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren*.

Rapat Akbar

Pertemuan besar besar ini digelar untuk membicarakan berbagai kegelisahan sosial yang dianggap perlu dengan memohon pertolongan Allah. Kata rapat sendiri bermakna pertemuan atau perkumpulan untuk membicarakan sesuatu.

Kata *akbar* bermakna lebih besar atau terbesar. Sebagai khazanah, rapat akbar telah menjadi kegiatan kultural masyarakat NU, sehingga biasa dan sering dilakukan baik oleh jamiyah NU atau oleh masyarakat NU yang lain.

Memang rapat besar seperti ini ada di dalam masyarakat secara umum, misalnya dalam sejarah pernah ada rapat raksasa di Lapangan

lkada, dan ada pertemuan-pertemuan besar yang dilakukan berbagai golongan masyarakat dengan berbagai nama.

Akan tetapi, yang menjadi khas khazanah masyarakat NU adalah penyebutan istilah rapat akbar. Keistimewaan lain dari rapat akbar adalah pembacaan serangkaian doa yang dimulai dengan pergelaran aneka kesenian khas pesantren, seperti *terbangan*, pembacaan Shalawat Badar, dan lain-lain.

Doa-doa yang dibaca biasanya adalah wirid-wirid istighotsah, pembacaan tahlil, dan wirid-wirid tertentu. Doa dan wirid-wirid istighotsah ini telah dicetak dalam buku kecil dan beredar luas di masyarakat NU, dan dijual di toko-toko buku.

Setelah wirid-wirid dibaca, biasanya ada tausiyah-tausiyah dari kiai-kiai NU untuk merespons masalah-masalah sosial masyarakat dan membicarakan masalah jamiyah. Dari sisi namanya saja bernama rapat akbar, maka pertemuan seperti ini tentunya untuk menanggapi soal-soal penting, dan karenanya masalah-masalah yang dibicarakan juga persoalan yang membutuhkan jawaban, tanggapan, dan sikap NU.

Rapat akbar ini pernah terkenal pada masa Orde Baru, meskipun rapat akbar sering dilakukan masyarakat NU sejak dulu hingga saat ini. Rapat yang terkenal itu diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 1992 M. yang bertempat di Stadion Senayan Jakarta.

Saat itu, Ketua Umum PBNU adalah KH Abdurrahman Wahid, dan rapat akbar ini bagian dari langkah kepemimpinan Gus Dur. Peserta rapat akbar saat itu setengah juta orang, dari target satu juta umat Nahdliyin. Kedatangan mereka banyak digembosi oleh penguasa kala itu.

Dalam rapat akbar itu, di antaranya dibacakan sembilan ikrar kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 45. Rapat Akbar ini dilaksanakan di tengah situasi politik ketika Presiden Soeharto sedang menggalang

dukungan kepada semua kelompok untuk mencalonkan diri dalam jabatan presiden yang kelima.

Gus Dur melihat perkembangan itu menjadi tidak sehat bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, dan bertentangan dengan kompetisi sehat yang bebas dan jujur. Pada saat yang sama Soeharto telah berhasil merangkul ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) untuk berada di belakangnya, dengan memanfaatkan simbol agama untuk dukungan kekuasaan politik.

Dalam konteks itu, rapat akbar yang diselenggarakan NU, di antaranya bertujuan: melakukan kritik secara kualitatif dan mengena, menghindari dukungan atas Soeharto untuk menduduki jabatan kepresidenan yang ke-5, dengan mengganti dukungan NU terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Pada saat itu, mereka yang tidak mendukung Soeharto dan melakukan kritik, dapat dibaca sebagai pembangkang, dan adanya rapat akbar saat itu, NU telah terhindar dari sebutan pembangkangan karena menunjukkan loyalitas kepada Pancasila dan UUD 45.

Pada saat yang sama, NU menjaga independensi untuk tidak melakukan dukungan kepada Soeharto bagi jabatan presiden yang ke-5 di tengah banyak kelompok melakukan kebulatan tekad mendukungnya.

Sejarah ini menggambarkan penggunaan maksud dan tujuan rapat akbar di kalangan NU yang dilakukan jamiyah NU. Dalam hal-hal lain, rapat akbar juga digunakan untuk merespons masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan, tempat diadakannya, dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya (termasuk warga NU).

Karena itu, rapat akbar ini bisa diselenggarakan di mana pun dan oleh siapa pun warga NU yang memiliki keprihatinan sosial yang dianggap penting, karena sebagai khazanah ia menjadi bagian dari kegiatan kultural masyarakat NU.

Sebagai khazanah masyarakat NU yang bisa diadakan oleh pesantren, warga NU, dan jamiyah NU sendiri, sangat berbeda dengan forum-forum resmi yang diadakan jamiyah NU, seperti muktamar (dulu namanya kongres), munas alim ulama, dan konbes. Forum-forum resmi ini harus dan hanya dilakukan oleh jamiyah NU.

Musyawarah Nasional Alim Ulama

Musyawarah nasional alim ulama atau munas alim ulama adalah forum pertemuan yang diselenggarakan pengurus besar syuriah sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan untuk membahas masalah keagamaan.

Munas dapat mengundang tokoh-tokoh alim ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah* dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama tokoh pengasuh pesantren, dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan.

Munas alim ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Sebagai forum bahtsul masail akbar, munas alim ulama membagi pembahasan masalah-masalah keagamaan ke dalam tiga kategori: (1) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), (2) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan (3) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan).

Keputusan munas tidak dapat mengubah AD/ART, keputusan muktamar, dan tidak mengadakan pemilihan pengurus. Untuk efektivitas penyelenggaraan, munas biasanya diselenggarakan bersamaan dengan konferensi besar (konbes). Dalam sejarah jamiyah NU, munas diadakan pertama kali di Kaliurang tahun 1981. Masalah-masalah yang dibicarakan, selain mengukuhkan KH Ali Maksum sebagai rais aam, juga memutuskan persoalan-persoalan yang dijawab peserta munas, di antaranya: bayi tabung, cangkok mata, bank mata, cangkok ginjal dan jantung, dan lain-lain.

Munas berikutnya diadakan di Situbondo pada 1983. Dalam munas bersejarah ini diputuskan Deklarasi Situbondo, yang merespons tentang Pancasila. Setelah itu, munas diadakan di Cilacap tahun 1987; di Bandar Lampung tahun 1992 yang memutuskan sistem pengambilan hukum di lingkungan NU boleh menggunakan pola *manhaji* dengan syarat-syarat tertentu; di Bagu, Lombok Tengah, NTB tahun 1997; dan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002; serta Munas 2012 di Kempek, Cirebon.

Konferensi Besar NU

Konbes NU atau konferensi besar NU adalah forum permusyawaratan NU yang digunakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar, mengaji perkembangan program, memutuskan Peraturan Organisasi (PO), serta menerbitkan rekomendasi. Oleh karena itu, dalam Konbes NU ini forum permusyawaratan dikerucutkan ke dalam tiga komisi pembahasan, yaitu Komisi Program, Komisi Organisasi, dan Komisi Rekomendasi.

Berbeda dengan munas alim ulama yang kepesertaannya lebih terbuka dengan mengundang dan melibatkan para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, dan para pakar, kepesertaan dalam forum Konbes NU sifatnya lebih tertutup. Peserta Konbes NU yang pelaksanaannya dibarengkan dengan munas, terdiri hanya anggota pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah saja.

Dalam buku kumpulan putusan muktamar, munas dan konbes yang diterbitkan oleh LTN PBNU pada 2011 yang berjudul *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010M)* disebutkan bahwa istilah konferensi besar telah digunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 1957. Tepatnya pada Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya yang dihelat pada 19 Maret.

Pengertian konferensi besar dalam konteks ini, berbeda dengan konsep konbes dewasa ini. Konbes syuriah kala itu secara konseptual mirip dengan munas alim ulama dewasa ini, yakni membahas

masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari hasil konbes syuriah NU tahun 1957 yang membahas tentang wanita menjadi anggota DPR dan meninjau ulang hukum *borg* dan gadai.

Konbes syuriah NU kembali dilaksanakan pada 18-22 April 1960 dan 11-13 Oktober 1961 yang sama-sama digelar di Jakarta. Ini menunjukkan konbes syuriah NU ini, bersifat insidental. Hal ini setidaknya dilihat dari tidak tercantumnya agenda tersebut dalam tata aturan permusyawaratan yang ada di ART NU. Setidaknya, ART NU yang dikeluarkan oleh PBNU pada 1968.

Penulis: Muhammad Faizin

Editor: Fathoni Ahmad

Pernahkah NU Menggelar Muktamar Luar Biasa?

Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama hasil Muktamar Ke-33 di Jombang, Jawa Timur Bab IX Pasal 22 disebutkan bahwa ada empat Permusyawaratan tingkat nasional dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama.

Permusyawaratan tersebut adalah Muktamar, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan Konferensi Besar. Dari keempat permusyawaratan ini, Muktamar Luar Biasa (MLB) permusyawaratan yang tidak begitu populer. Hanya pada momen-momen penting dan krusial suara-suara tentang MLB dimunculkan.

Mengacu pada Anggaran Rumah Tangga NU pasal Pasal 73, MLB bisa diselenggarakan pada kondisi-kondisi tertentu dan krusial seperti apabila Rais 'Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. MLB dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.

Dalam *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren* yang ditulis oleh M. Imam Aziz dkk. Disebutkan paling tidak ada dua contoh bagaimana usulan-usulan dan praktik MLB diadakan di lingkungan NU.

Pertama adalah setelah Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1994 saat Abu Hasan kalah dari Gus Dur saat pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Abu Hasan kemudian pernah mengadakan MLB mengatasnamakan NU.

Karena tidak didukung oleh mayoritas cabang-cabang ia sangat kesulitan. Namun berkat dukungan kekuasaan pada saat itu, Abu Hasan tetap menggelar MLB NU di Pondok Gede, Jakarta, pada Januari 1996. Keabsahan cabang-cabang yang hadir pun dipertanyakan.

Dari MLB yang disebut sebagai MLB rekayasa versi Abu Hasan yang didukung rezim kekuasaan saat itu, Abu Hasan kemudian membentuk KPPNU sebagai hasil MLB versinya. Organisasi yang bernama KPPNU ini mati dengan sendirinya. Ini karena KPPNU tidak didukung kiai-kiai NU, aktivis-aktivis NU, dan tidak diapresiasi syuriah dan warga NU.

Wacana kedua tentang MLB juga pernah disuarakan kelompok-kelompok kultural NU menjelang Muktamar NU di Boyolali, Jawa Tengah, pada 2004. Namun usulan ini hanya berhenti di tingkat usulan saja. Dalam praktiknya, MLB tidak dilaksanakan karena PB Syuriah tidak mengagendakan dan tidak menjadikan MLB sebagai solusi untuk membenahi NU pada saat itu.

Dari dua kejadian ini disimpulkan bahwa MLB tidak pernah dilaksanakan di lingkungan NU karena mekanisme musyawarah masih dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Meski begitu, sebagai aturan organisasi, MLB tetap diberi peluang untuk bisa dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat.

Penulis: Muhammad Faizin

Editor: Fathoni Ahmad

Respons Para Kiai dan Kaum Intelektual pada Muktamar NU

Muktamar NU kedua yang diselenggarakan pada tahun 1927 itu tergolong muktamar yang meriah. Bayangkan muktamar yang diselenggarakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya tersebut dihadiri oleh 18 ribu jamaah, terdiri dari 150 kiai, dari seluruh penjuru tanah Jawa bahkan beberapa datang dari perwakilan ulama Sunni dari luar negeri. Mereka datang dengan biaya sendiri bahkan menginfakkan sebagian hartanya untuk NU yang baru berdiri itu.

Kibaran bendera NU yang baru saja diciptakan menambah semarak dan membuat suasana syahdu hajatan NU tertinggi itu, sehingga mampu menggetarkan jiwa para muktamirin dan hadirin yang mendambakan kedamaian dan kemerdekaan.

Ternyata muktamar itu tidak hanya menyedot perhatian kaum santri dan Nahdliyin khususnya tetapi juga mendapatkan dukungan besar dari para aktivis pergerakan atau kebangkitan nasional dan kaum intelektual pada umumnya, mereka hadir pada acara muktamar itu seperti pendiri dan ketua Budi Utomo Dr. R. Soetomo, Dr. RM Haryo Suyono.

Kedekatan Soetomo dengan Kiai Wahab maupun Kiai Hasyim Asy'ari memang sudah lama terbina, yakni sejak awal zaman pergerakan, karena itu pikirannya berbeda dengan kaum terpelajar lainnya yang *nirlando centrisme* (berkiblat Belanda). Walaupun terpelajar secara Barat, tetapi Soetomo terdidik secara timur (Islam), karena itu dalam *Polemik Kebudayaan* melawan ST Alisjahbana, Dr Soetomo dengan gigih membela tradisi pesantren yang hendak dibabat S. Takdir. Dengan adanya ikatan budaya dengan NU itu Soetomo hadir dalam Muktamar NU.

Dukungan Soetomo pada NU sangat jelas sebab NU memiliki pendidikan pesantren yang mengutamakan pendidikan moral, sementara sekolah Belanda hanya memberikan pengajaran tanpa pendidikan, karena itu tidak bisa membentuk karakter kebangsaan. Maka lembaga pendidikan tradisional yang mampu melakukan pendidikan, tidak hanya pengajaran, karena itu gerakan NU untuk melestarikan pendidikan tradisional mesti didukung sebagai tandingan atas persekolahan Barat yang hanya akademis, tanpa memberikan pendidikan budi pekerti pribumi yang sangat diperlukan dalam membangun karakter bangsa ini.

Selain perorangan hadir pula 45 organisasi pergerakan. Dari kalangan pejabat hadir tiga orang penghulu *landraad*, seorang anjun penghulu, empat orang naib serta empat orang wakil pemerintah. Dan yang paling menonjol adalah hadirnya seorang tokoh legendaris, kader dari Snouck Horgronje yakni Van Der Plas. Orang ini tidak hanya pandai bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya, tetapi juga pandai berbahasa Arab seperti gurunya.

Hadirnya Van Der Plas dalam forum semacam ini sebenarnya tidak lebih sebagai upaya untuk mengamati gerak-gerik organisasi yang baru ini, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan politik, karena pada akhirnya tokoh Belanda ini menjadi Gubernur Jawa Timur yang sangat dekat dengan kalangan kiai, karena itu ada orang yang memutar balik sejarah bahwa kelahiran NU dimotori oleh Van Der Plas untuk menghalangi gerakan kemerdekaan. Tentu tuduhan palsu itu tanpa didasarkan pada fakta sejarah yang sesungguhnya.

Perlu diketahui bahwa NU lahir melalui proses panjang, sejak dari Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathan, Taswirul Afkar dan sebagainya, maka eksponen dalam tiap tiap embrio NU tersebut dilibatkan dalam muktamar. Demikian juga dalam Muktamar II ini dihadiri beberapa orang kaum dagang yang dulunya tergabung dalam Nahdlatul Tujjar seperti HA Kahar (Surabaya), HA. Syukur (Kediri), H. Hasan Surati (Malang) dan sebagainya. Mereka itu para hartawan yang menanggung seluruh biaya perhelatan besar

ini. Karena itu dalam *muqarrarat* (ketetapan) muktamar ini banyak membicarakan soal hukum dagang seperti penebasan, surat berharga dan sebagainya. Sementara itu dari kalangan Taswirul Afkar banyak memberikan pemikiran mengenai pengembangan pemikiran Islam seperti gagasan penerjemahan khutbah Jumat, persoalan kesenian dan sebagainya. Sedangkan kalangan Nahdlatul Wathan banyak memberikan masukan tentang pengembangan pendidikan, terutama pendidikan agama di sekolah Belanda.

Walaupun muktamar waktu itu hanya berlangsung tiga hari tiga malam, tetapi karena waktu dimanfaatkan secara intensif, semua terkonsentrasi ke masalah substansi bukan perebutan posisi, maka beberapa keputusan penting bisa tercapai. Dan kalau dilihat sebagian besar keputusan bersifat di sekitar persoalan sosial keagamaan dan ekonomi.

Belum kelihatan persoalan politik direspon. Hal itu terjadi karena ormas dan organisasi saat itu sangat ketat di bawah pengawasan kolonial. Karena itu khutbah iftitah yang disampaikan Rais Akbar (Kiai Hasyim Asy'ari) selalu dalam bahasa Arab, yang merupakan strategi perjuangan, demikian halnya semua keputusan juga ditulis dalam bahasa Arab, minimal bahasa Jawa tulisan Arab, ini juga merupakan strategi menghindari tekanan Belanda, yang terus-menerus mengintai gerakan NU. (Mun'im DZ)

Voorstel Pendidikan dari Menes di Muktamar Keempat

Ada kegairahan dari Cabang NU Pandeglang menyambut muktamar NU keempat di Semarang. Selain aktif mengajukan pertanyaan, cabang tersebut mengajukan permohonan yang cukup maju dalam bidang pendidikan.

Perlu diingat, ketika HBNO mengirimkan utusannya ke daerah tersebut, pada tahun 1928, pengurus NU Pandeglang mengajak berkeliling mengunjungi madrasah-madrasah yang akan menjadi bagian dari pendidikan NU. Kelak akan kelihatan bahwa cabang tersebut, memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan melalui madrasah itu.

Menurut laporan *Swara Nahdlatol Oelama*, madrasah-madrasah tersebut sudah milik gedung sendiri serta sudah diatur sebagaimana umumnya sekolah. Madrasah-madrasah itu dikepalai oleh Kiai Yasin, Wakil Rais Syuriyah NU. Sementara yang mengatur seluruh materi pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kepada murid yaitu Kiai Mas Abdurrahman. Ia dibantu oleh empat anggota yaitu Kiai Abdul Mu'ti, Kiai Sulaiman, Kiai Dawud, Kiai Ajun.

Untuk memperkuat keilmuan guru-guru di madrasah itu, diadakan sekolah guru setiap Kamis. Guru-guru dan pelajarannya diperiksa langsung oleh Kiai Mas Abdurrahman dibantu oleh tiga guru yang sudah pernah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan demikian, pada hari itu, seluruh murid libur.

Sebelum muktamar keempat, Cabang Pandeglang mengirimkan *voorstel* (pengajuan) kepada HBNO agar membahas masalah pendidikan. *Voorstel* tersebut dimuat di *Swara Nahdlatol Oelama* edisi bundel hal 172-173. Berikut usulan tersebut:

Diharap supaya mengadakan Departemen Onderwijs (Bagian Pengajaran) buat mengatur nizamnya (organisasiennya) pengajaran madrasah-madrasah dan mengatur pangkat susunannya madrasah, yang rendah, yang pertengahan, dan yang tinggi, agar supaya madrasah-madrasah yang sudah di bawah genggamannya Nahdlatul Ulama bisa sama pengaturan dan pelajarannya dan anak-anak yang maju himmah tiada putus di tengah jalan, juga dengan diadakan fonds (persediaan uang) buat keperluannya yang mengatur tersebut di atas.

Tak salah kemudian, pada muktamar NU ke-13 yang berlangsung di daerah Menes, masalah pendidikan menjadi salah satu pembahasan pokok sehingga melahirkan keputusan didirikannya Lembaga Pendidikan Ma'arif.

(Abdullah Alawi)

Kiai-kiai Jawa Barat di Awal Muktamar NU

Sampai muktamar ketiga di Surabaya, tahun 1928, hanya beberapa kiai Jawa Barat yang hadir. Di antaranya KH Abdurrahman Menes, Banten, KH Muhyi Bogor, KH Abdullah Cirebon, dan KH Abdul Halim Leuwimunding, Majalengka. Namun, kiai yang disebut terakhir itu memang waktu itu beraktivitas di Surabaya sebagaimana KH Idris Kamali asal Cirebon yang hadir di muktamar kedua di kota yang sama. Waktu itu Kiai Idris tidak beraktivitas dari kota asalnya, melainkan di Jombang, karena ia adalah menantu Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.

Barulah pada muktamar keempat di Semarang, tahun 1929 kiai dari Jawa Barat bertambah. Selain yang disebutkan sebelumnya, kecuali KH Muhyi Bogor, hadir di antaranya KH Ahmad Dimiyati Sukamiskin Bandung, KH Abdullah Kuningan, KH Abdullah Indramayu, KH Abdul Latif Cibeber Banten, Penghulu Junaidi Batavia, Guru Manshur Batavia (Jakarta), KH Abdul Aziz Cilegon (Banten), Abdul Khair Cirebon, KH Dasuqi Majalengka dan Syekh Ali Thayib yang mewakili Tasikmalaya.

Kiai yang disebut terakhir itu sebetulnya bukan asli dari Tasikmalaya. Ia adalah seorang ulama Timur Tengah yang sedang menyebarkan tarekat Tijaniyah, yang kebetulan di Tasikmalaya. Ia tinggal di kampung salah seorang pendiri NU Tasikmalaya, KH A. Qulyubi (Ajengan Unung) yang dikabarkan pengamal tarekat yang sama.

Menurut Choirul Anam dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, sejak muktamar keempat itu, ada sekitar 13 Cabang di Jawa Barat. Perlu diketahui, dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda, waktu itu Provinsi Jawa Barat mencakup wilayah Jawa Barat sekarang, Provinsi Banten sekarang, dan DKI Jakarta.

Namun, sayangnya buku itu tak menyebutkan satu per satu cabang NU yang ada di Jawa Barat waktu itu. Yang ditemukan secara pasti tanggal dan susunan pengurusnya, yang berdiri dan diresmikan HBNO sebagai cabang NU adalah Cabang Pandeglang yang berpusat di Menes. Hal itu ditemukan di majalah *Swara Nahdlatol Oelama*. Mungkin ada, tapi belum penulis ketahui.

Sementara cabang lain semisal Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta sendiri belum ditemukan data dan susunan pengurusnya. Namun kemungkinan besar, daerah seperti Cirebon dan Bandung, dan Jakarta, merupakan daerah yang ditargetkan HBNO untuk segera ada cabang NU-nya.

Hal itu terbukti, daerah-daerah itu menjadi tempat muktamar NU yang dari tahun ke tahun semakin ke barat. Muktamar pertama hingga ketiga di Surabaya. Keempat, di Semarang 1929. Kelima, di Pekalongan 1930. Keenam, di Cirebon 1931. Ketujuh, di Bandung 1932. Kedelapan, di Jakarta 1933. Setelah itu kembali lagi ke timur. (Abdullah Alawi)

Napak Tilas Muktamar NU 1930 di Pekalongan

Tahun 1930 silam, Kongres atau Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali diselenggarakan di wilayah Jawa Tengah, setelah tahun sebelumnya Muktamar dihelat di Kota Semarang. Kali ini, giliran Pekalongan yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah gelaran muktamar yang kelima.

90 tahun berselang, di penghujung Oktober 2020 lalu, penulis mencoba untuk menapaktilasi peristiwa tersebut. Berbekal dari tulisan di Majalah *Swara Nahdlatol Oelama* (SNO) edisi tahun 1349 H, penulis mengawali kegiatan napak tilas, dengan mendatangi dua tempat yang disebutkan dalam Majalah SNO, yakni Hotel Oranye dan Masjid Jami Pekalongan.

Dalam catatan Majalah SNO disebutkan, pelaksanaan kongres (muktamar) dimulai sejak Selasa, 15 Rabi'ul Akhir atau 8 September 1930, bertempat di Hotel Oranye dan Masjid Jami Pekalongan.

“Kongres Nahdlatul Ulama kang kaping gangsal dhawah tahun 1349 Hijriah. Punika manggen wonten Griya (Oranye Hotel) Kampung Kepatihan Straat Pekalongan. Wiwit malem Selasa (tanggal 15) dumugi dinten Kamis (17) wulan Rabi’uts Tsani 1349 / 8 dumugi 11 September 1930. Salajeng malam Jumat, tanggal 18 sedaya putusan kadamel Openbaar (ijtima’ umume) wonten Masjid Jami Pekalongan.”

(Kongres Nahdlatul Ulama yang kelima jatuh (terselenggara) pada tahun 1349 Hijriah. Bertempat di Hotel Oranye Kampung Kepatihan Straat Pekalongan. Dimulai sejak malam Selasa (tanggal 15) hingga Kamis (17) bulan Rabiuts Tsani 1349 atau bertepatan dengan tanggal 8-11 September 1930 M. Kemudian, pada malam Jumat, tanggal 18 Rabiuts Tsani semua hasil pembahasan diplenokan bersama, bertempat di Masjid Jami Pekalongan).

Untuk Masjid Jami yang terletak di daerah Kauman, Kota Pekalongan, penulis tidak banyak menemui kesulitan untuk menemukannya. Sebab sampai sekarang, masjid yang dibangun pada tahun 1852 M itu masih berdiri dengan kokoh, di sebelah Barat Alun-alun Kota Pekalongan.

Sedangkan, ketika mencari keberadaan Hotel Oranye Kepatihan, penulis mengalami kesulitan, sebab hotel tersebut kini sudah berganti nama serta keberadaannya juga tidak banyak yang tahu. Penulis kemudian mencoba melacak nama Kampung Kepatihan, dari sebuah peta Pekalongan tahun 1918, yang ternyata terletak tak jauh dari Masjid Jami Pekalongan. (lihat peta)

Faktor penting

Tentu bukan sebuah kebetulan, bila muktamar ke-5 ini diselenggarakan di daerah yang terkenal sebagai penghasil kain batik tersebut. *Pertama*, pada dua tahun sebelumnya atau tepatnya tanggal 9 Rabiul Awwal 1347 H /25 Agustus 1928, telah berdiri cabang NU di Pekalongan.

Prosesi pendirian dan pengukuhan pengurus, sebagaimana disebutkan dalam SNO, yang bertempat di Kampung Pesindon, Kergon, Pekalongan, dihadiri langsung rombongan dari Hoofd Bestuur Nahdlatol Oelama' (HBNO/ kini disebut PBNU) yang diwakili KH Abdul Wahab Chasbullah, yang didampingi KH Bisri Syansuri, yang saat itu masih menjadi Pengurus Cabang NU Jombang.

Selain itu juga turut Kiai Abdullah Ubaid, tokoh muda NU dari Surabaya. Ada pula KH Faqih Maskumambang dari Gresik dan seorang rekannya yang menjadi pengurus Nahdlatul Wathan Cabang Gresik, KH Dlofier Muhammad Rofi'i.

Setelah disepakati berdirinya NU Cabang Pekalongan, kemudian disusun pengurus syuriyah dan tanfidziah. Adapun susunan pengurus NU Cabang Pekalongan periode pertama, adalah sebagai berikut:

Syuriah: Kiai Abbas Medelan (rais), Kiai Zuhdi Kergon (naib rais), Kiai Ismail Kergon (katib), Kiai Ma'shum Kergon, Kiai Dahlan Krapyak (a'wan), dan Kiai Amir Banyuurip (mustasyar).

Tanfidziyah: Haji Ambari Ismail Pesindon (presiden/ketua), Haji Ahmad Pesindon (wakil presiden), Abdullah Pesindon (sekretaris), Nahrowi Pesindon (bendahara), Masyhuri Pejagalan, Ambari Kurdi Pesindon, Fadoli Kauman, Muhammad Hadi Pesindon, dan Abdul Latif (komisaris).

Tak hanya berhasil menyusun kepengurusan cabang pertama, pada pertemuan itu juga disepakati program kerja *pertama* yang akan dilaksanakan oleh NU Pekalongan. Programnya adalah menggelar pendidikan keagamaan setiap hari Senin dan Kamis di Masjid Jami Kauman Pekalongan.

Kedua, wilayah Karesidenan Pekalongan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan antara Kota Semarang, sebagai pusat daerah Jawa Tengah dengan daerah Cirebon, kemudian Jawa Barat dan Batavia, yang menjadi wilayah sasaran pengembangan NU di tahun-tahun berikutnya.

Hasil kongres

Antusiasme masyarakat Pekalongan terhadap penyelenggaraan ini cukup besar, terbukti ketika diadakan kegiatan pengajian umum di Masjid Jami Pekalongan, dihadiri sekitar 5.000 orang. Sedangkan dari catatan buku tamu yang dimiliki panitia, tercatat ada 2.222 orang yang ikut terlibat atau menghadiri acara muktamar di Pekalongan, mulai dari awal hingga akhir.

Para kiai yang hadir, selain dari pengurus pusat, juga dari Pekalongan sendiri di antaranya Kiai Zuhdi, Kiai Munawwir, Kiai Amir, Kiai Abu Bakar, Kiai Mr. Usman, Kiai Mr. Ahmad, Kiai Mahfudh, Kiai Mawardi, Kiai Dimiyati, Kiai Subki, Kiai Raden Abdul Qadir, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari luar Pekalongan, seperti Semarang diwakili Kiai Usman, Kiai Hamim, beserta rombongan. Dari Solo diwakili Kiai Kholil. Kemudian dari wilayah luar Jawa Tengah, ada dari Cirebon yang diwakili Kiai Abbas dan rombongan. Lalu Kiai Ridwan dari Surabaya.

Termasuk yang tidak kalah penting dari muktamar ini, yakni kehadiran dan pernyataan dukungan dari KH Dimiyati Tremas kepada NU, yang semakin menggugah semangat para kiai lainnya, khususnya para kiai dan santri alumni Tremas yang sudah tersebar ke berbagai penjuru untuk semakin mantap berkhidmat bersama NU.

Beberapa persoalan yang dibahas dalam kongres atau muktamar ke-5 ini, antara lain macam-macam kafir, membeli emas dengan uang kertas, memakai sandal yang ditemukan di masjid, anak yang lahir sesudah ibunya di-*talaq*, perayaan untuk memperingati jin penjaga desa/sedekah bumi, melempar kendi yang penuh air pada upacara ketujuh dari umur kandungan (*tingkeban*), berdiri ketika memperingati maulid nabi, dan lain sebagainya.

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Fathoni Ahmad

Habib Ali Kwitang Berpidato di Muktamar NU Bandung 1932

Beberapa hari lalu, kabar duka bagi umat Islam, khususnya daerah Jakarta. Pasalnya, Habib Abdurrahman bin Muhammad menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (15/1/2018) pukul 19.10 WIB.

Ia adalah cucu dari dari *al-Alim, al-Allamah* Sayyid Ali Kwitang atau disingkat Habib Ali Kwitang. Habib Ali Kwitang merupakan salah seorang tokoh yang hadir pada Muktamar NU ketujuh di Bandung pada tahun 1932.

Muktamar NU Bandung berlangsung pada tanggal 12 sampai 16 Rabiul Tsani 1351 H bertepatan dengan 15 sampai dengan 19 Agustus 1932 M. Muktamar itu diakhiri dengan *openbaar* (rapat umum) yang berlangsung di masjid Jami Kota Bandung.

Pada rapat umum itu, Masjid Jami Kota Bandung dihadiri sepuluh ribu kaum Muslimin yang hadir dari kota-kota terdekat sekitar Jawa Barat, para peserta muktamar dari berbagai daerah di Indonesia, para pengurus Hoofd Bestuur Nahdlatoe Oelama (HBNO, sekarang PBNU).

Menurut laporan muktamar tahun itu, hadir 197 ulama dan 210 pengiringnya dan tamu lain-lain dari 83 daerah di Indonesia.

Para ulama itu itu menyelesaikan beberapa persoalan yang diajukan jauh-jauh hari dari berbagai cabang. Para ulama berhasil menyelesaikan persoalan nomor satu hingga 12 secara berurutan. Kemudian mereka membahas langsung nomor 23 oleh karena sangat urgen segera diselesaikan.

Selain itu, hasil muktamar memberikan banyak rekomendasi untuk pemerintah dan pengurus cabang NU sendiri.

Menurut *Swara Nahdlatol Oelama*, pada penutupan muktamar NU Bandung, beberapa tokoh terkemuka dipersilakan untuk berpidato. Selain KH Wahab Chasbullah yang berpidato adalah *al-alim, al-allamah* Sayyid ‘Alawi al-Haddad, Bogor dan Tuan Raden Haji Wiranata Kusumah. Turut berpidato juga pada kesempatan itu *al-alim, al-allamah* Sayyid Ali Kwitang Batavia (Jakarta), kakek Habib Abdurrahman bin Muhammad.

Namun sayang sekali, *Swara Nahdlatol Oelama* tidak mencantumkan apa isi pidato dari tokoh-tokoh itu. (Abdullah Alawi)

Bagaimana NU Membiayai Muktamar di Zaman Kolonial?

Banyuwangi memiliki peranan penting dalam proses perintisan Nahdlatul Ulama. Tercatat, semenjak pertama kali NU didirikan, Banyuwangi telah ikut serta. Melalui KH Saleh Lateng, Banyuwangi ikut serta menghadirkan perwakilannya dalam rapat pembentukan Komite Hijaz sekaligus awal berdirinya NU di Bubutan, Surabaya, tahun 1926.

Kontribusi lain yang cukup penting dari Banyuwangi bagi NU adalah dengan menjadi tuan rumah Muktamar ke-9 NU pada 1934. Muktamar tersebut, menurut Choirul Anam dalam *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, merupakan muktamar yang menjadi penanda NU dari fase pertumbuhan menuju fase perkembangan.

Surat kabar *Indische Courant* tertanggal 24 April 1934 melaporkan bahwa pembukaan yang digelar di halaman Madrasah Al-Chairiyah yang tak jauh dari Masjid Agung Baiturrahman dihadiri oleh ribuan orang. Kursi undangan penuh dan ribuan orang lainnya berdesakan di halaman yang luas itu. Bahkan, hingga meluber di jalan-jalan.

Dalam konteks saat ini, mungkin tak terlalu sulit untuk bisa menyelenggarakan acara besar berskala nasional. Seperti halnya Muktamar ke-33 NU di Jombang pada tiga tahun silam. Untuk menggelar acara tersebut, PBNU mendapat bantuan Rp 10 M dari APBD Provinsi Jawa Timur dan Rp 1 M dari APBD Kabupaten Jombang. Tapi, untuk konteks tahun 1934 tentu mustahil mengharap bantuan dari pemerintah. Karena, sebagaimana kita ketahui, saat itu, Indonesia masih dalam kungkungan penjajah.

Jangankan meminta bantuan pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda kala itu, meski diberinya secara cuma-cuma pun, NU tidak bakal menerimanya. Haram hukumnya menerima bantuan penjajah!

Lantas, yang menjadi pertanyaannya: dari manakah biaya penyelenggaraan muktamar saat itu?

Menarik kiranya kita memeriksa laporan keuangan panitia muktamar yang salah satu keputusan pentingnya mendirikan Anshoru Nahdlatul Ulama (Sekarang: GP Ansor) tersebut. Dalam *Origineel 17 October 1934 Verantwoording Congres Nahdlatoel Oelama jang ke-9 di Kotta Banjoewangi* dilaporkan bahwa biaya penyelenggaraan mengumpulkan dana sebesar f. 1882,98 (f adalah simbol rupiah di masa Hindia Belanda).

Dalam laporan yang ditandatangani oleh Machmoed (*president*), R. Tedjosoekarto (*secretaris*), dan R.H. Hamdjah (*kassier*) tersebut, tertulis lima jenis sumber pendanaannya. *Pertama*, berasal dari oewang *borg* Tjabang Nahdlatoel Oelama Banjoewangi sebesar f. 222.50. Dana ini merupakan pemasukan dari kas PCNU Banyuwangi kala itu.

Kas tersebut dikumpulkan dari iuran *lied* (anggota) NU Banyuwangi. Dulu, untuk bisa menjadi anggota NU, seseorang harus membayar sebesar 10 sen. Kemudian, ada juga iuran bulanan yang besarnya separuh dari uang pendaftaran. Sebagaimana diatur dalam Kitab Oemoem Atoeran Roemah Tangga Bagian Oemoem dan Bagian Harta Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama 1926.

Namun, di NU Banyuwangi sebagaimana dilaporkan pada Muktamar XI di Banjarmasin. Dalam laporan tersebut, setiap anggota NU ditarik kontribusi tidak 10 Sen sebagaimana aturan yang ditetapkan dari pusat. Tapi ditarik secara keseluruhan untuk seumur hidup sebesar f. 1- f. 1,5. Dari hasil iuran tersebut, tidak semuanya dipergunakan untuk operasional organisasi. Akan tetapi, sebagian dipergunakan untuk membeli kebun kelapa. Dari langkah ini, hasil iuran *lied* tersebut, dapat berkembang.

Pemasukan *kedua*, berasal oewang derma *lisjt* dari Tjabang-Tjabang Nahdlatoel Oelama yang sebesar f. 883,12 (1/2). Memang, setiap penyelenggaraan muktamar, cabang-Cabang NU dari berbagai daerah dikenakan iuran. Dari pengamatan penulis, tidak ada

ketentuan khusus harus membayar berapa. Karena dari laporan-laporan keuangan muktamar, pembayaran dari masing-masing cabang memiliki besaran yang berbeda-beda. Seperti pada saat Muktamar VIII di Jakarta, NU Cabang Banyuwangi membayarkan derma sebesar f. 25 yang kala itu, dibawa oleh KH Syamsuri Singonegaran.

Uang iuran cabang-cabang tersebut, bisa dari kas organisasi sebagaimana NU Banyuwangi, bisa pula dari iuran anggotanya. Kiai Muchit Muzadi dalam biografinya, *Berjuang Sampai Akhir: Kisah Seorang Mbah Muchit* mengenang setiap menjelang pelaksanaan muktamar, para anggota NU dikenakan iuran wajib sebesar 20 sen, termasuk dirinya. Dalam buku tersebut, Mbah Muchit juga mengenang kisah Kiai Mu'thi yang berasal dari Ngawi. Untuk menuju ke muktamar di Banyuwangi, guna menghemat biaya, ia rela naik sepeda gayung dari Ngawi hingga ke Banyuwangi. Kurang lebih sejauh 467 KM. Luar biasa!

Sumber pendanaan *ketiga* berasal oewang derma *lisjt* Tjabang Nahdlatoel Oelama Banjoewangi. Dari derma ini, terkumpul dana sebesar f. 16,45. Tak ada catatan tentang bagaimana bentuk pengumpulan dana dari sumber ini. Besar kemungkinan, ini berupa pembagian *serkiler* untuk diisi derma seikhlasnya. Atau bisa juga berupa list pembacaan doa untuk arwah sanak famili dengan menggantinya dengan sedekah sekian per namanya.

Yang *keempat*, dalam laporan keuangan tersebut, pemasukan berupa derma makanan dari pendodoekan Banjoewangi Matjem. Pihak panitia mengkalkulasi jumlah bahan makanan yang masuk, sebesar f. 55, 65 (1/2). Tak heran, jika sumbangan berupa makanan dari penduduk Banyuwangi memiliki sumbangsih cukup besar. Banyuwangi merupakan lumbung pangan di tengah anugerah alam yang amat subur.

Dalam penelitian penulis, Cabang Banyuwangi terkadang harus menyewa satu gerbong khusus untuk mengirim bahan makanan guna mendukung penyelenggaraan muktamar. Seperti halnya muktamar di Jakarta setelah perang kemerdekaan, NU Banyuwangi mengirim

100 kwintal beras untuk konsumsi muktamar. Jumlahnya jauh jika dibandingkan dengan sumbangan dari cabang-cabang lainnya.

Sumber terakhir yang tercatat dalam laporan keuangan Muktamar IX adalah djoewel barang-barang yang telah dipake. Hasil penjualan dari barang bekas ini, hanya f. 5,25. Tak ada catatan, barang apa yang dijual. Mungkin, ini semacam lelang.

Dari fakta di atas, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama bagi warga NU Banyuwangi. Dapat dikatakan, NU telah mampu mandiri dengan membiayai semua kebutuhan operasionalnya sendiri dengan cara dipikul bersama. Tanpa mengharap belas kasih pihak lain. Ini tentu tidak sekedar menumbuhkan kemandirian organisasi, tapi juga memunculkan kesolidan dan solidaritas yang kukuh di setiap anggota NU.

Di tengah keterbatasan zaman penjajahan, NU mampu berdikari. Para anggotanya dengan sukarela menyumbangkan sebagian rezeki, bahkan bisa jadi bagian terbesar dari hartanya, untuk keberlangsungan NU. Ini merupakan teladan penting. Jika para pendahulu itu dengan segala kesulitannya bisa melakukan, maka kita dengan segala kemudahan masa kini tentu lebih bisa melakukannya. Bukan begitu?

Salam Mandiri. Salam Sukses Koin Bakti NU!

Ayung Notonegoro, pemerhati sejarah NU Banyuwangi; dapat ditemui di akun facebooknya, "Ayunk Notonegoro"

KH Zainul Arifin dan Muktamar Ke-13 NU di Menes

“Kakekmu itu murid, teman, kolega dan sahabat seperjuangan bapak saya di NU,” tutur Gus Dur padaku di ruang tetirah pribadinya di Ciganjur. Tepat 40 hari sebelum Presiden RI ke-4 itu berpulang ke *Rahmatullah*, pagi itu saya dan wartawan *NU Online* sengaja sowan ke Ciganjur dalam rangka peringatan seabad kelahiran kakek saya, KH Zainul Arifin. Kami memohon Gus Dur untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Kongres ke-13 NU di Menes

Kenyataannya memang Zainul Arifin dan KH Wahid Hasyim sudah saling mengenal dan akrab bersahabat sekira tahun 1936 manakala Kiai Wahid baru kembali dari pendidikannya di tanah suci dan memutuskan untuk berpindah ke Batavia. Di Batavia, Kiai Wahid banyak mewakili ayahandanya Hadratussyekh Hasyim Asy'ari yang karena usianya lebih memilih tinggal di Jombang.

Tahun 1935, Arifin sudah menjadi ketua Majelis Konsul Jawa Barat setelah sebelumnya aktif berkiprah di GP Ansor sejak wadah pemuda ini belum resmi bernaung di bawah NU. KH Wahid Hasyim, Zainul Arifin, AA Achsien dan Djamaluddin Malik bersinergi memajukan pertumbuhan NU di Batavia, Banten dan Jawa Barat. Pergaulan keempatnya melebar bukan hanya di kalangan pesantren saja, melainkan pula di antara masyarakat luas dari seniman hingga ke pebisnis.

Bulan Juni 1938, NU menyelenggarakan kongres (Muktamar) ke-13 di Menes, Banten. Atas restu KH Hasyim Asy'ari yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan, Kiai Wahid menugasi KH Zainul Arifin sebagai ketua panitia pelaksana.

Dari dana hingga perizinan

Zainul Arifin memiliki latar belakang pendidikan Belanda HIS dan Normaal School di Sumatera. Karenanya Zainul fasih berbahasa Belanda dan Inggris. Selain itu, Arifin pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial *gemeente* selama 5 tahun. Berbekal semua itu, KH Zainul Arifin ditugasi PBNU menghadap pemerintah Residen Serang guna mendapatkan izin keramaian di daerahnya.

Zainul Arifin dan rekan-rekan juga menggalang dana yang dikumpulkannya dari kalangan bisnis simpatisan NU. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik olehnya.

Pemimpin semua sidang

Seluruh persidangan selama muktamar di Menes dipimpin oleh Zainul, kecuali 1 sidang yang berlangsung bertepatan dengan janji temu yang harus dilakukannya untuk menghadap pemda setempat (Residen Serang) agar NU diizinkan melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.

Kepiawaian Arifin mengatur pelaksanaan muktamar yang banyak dikenang kesuksesannya itu mendapat banyak pujian dari segenap muktamirin. Tidak kurang dari Ketua PBNU KH Mahfudz Shiddiq menyatakan:

“Ketua Majelis Konsul Meester Cornelis Tuan Zainul Arifin namanya berarti perhiasan para mengerti atau ahli terpelajar. Maka, pantaslah beliau menyandang nama itu sebab beliau satu-satunya yang serba cukup pengalamannya, sabar serta tawakal terhadap apapun yang harus beliau hadapi dan terutama adil serta bijaksana pimpinannya. Tanpa beliau, Kongres NU terasa sunyi, kesepian, kurang hebat dan ramai.”

Di bawah kewibawaan kepemimpinan KH Zainul Arifin yang piawai dalam mengelola forum, Kongres ke 13 Menes menelurkan hasil-hasil penting berupa masalah-masalah politik, pengembangan ekonomi riil dan perbankan, bahkan hingga ke penentuan pakaian khas untuk anggota Muslimat NU.

Penulis: Ario Helmy

Editor: Abdullah Alawi

Muktamar Ke-10 NU (1): Muktamar di Solo Ditopang Tiga Cabang

85 tahun silam, atau tepatnya pada tanggal 13-19 April 1935 M/9-14 Muharram 1354 H, Kota Solo yang kala itu masih menjadi ibu kota Kerajaan Kasunanan Surakarta dan dipimpin Paku Buwono X, terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara kongres atau Muktamar Ke-10 Nahdlatul Ulama.

Proses persiapan dan dinamika penyelenggaraan Muktamar kesepuluh ini tercatat lengkap dalam buku *Poeteosan Congres Nahdlatuel 'Oelama' ka 10* di Solo Soerakarta Tanggal 13-19 April 1935 yang diterbitkan oleh Hoofd-Bestuur Nahdlatuel Oelama' (HBNO).

Catatan mengenai kongres di Solo, dimulai dari pembahasan rumah (lokasi) penyelenggaraan muktamar, yakni di rumah Kanjeng Gusti Surya Sugiyantan Mangkunegaran. Rumah Kanjeng Gusti Surya Sugiyanta putra KPPA Mangkunegara V (Lahir 1887 M), terletak di Giyantan. Kemudian juga Masjid Agung Kasunanan dan Masjid Mangkunegaran yang digunakan untuk acara lokasi Openbaar (pengajian umum).

Meskipun penyelenggaraan muktamar dilaksanakan di Kota Solo, namun beberapa cabang terdekat seperti Klaten dan Boyolali juga ikut membantu cabang Solo dalam melayani para tamu serta kelancaran pelaksanaan muktamar.

Kemudian untuk memudahkan koordinasi, dibentuklah sebuah kepanitiaan (lajnah/komite) lokal kongres yang terdiri dari 3 cabang, yakni Solo, Boyolali, dan Klaten. Adapun sebagai *voorzitter* (ketua) panitia dipilihlah nama KH Masthur, dengan didampingi Kiai Habib (Mangkunegaran) sebagai wakil ketua, dan Mas Ngabehi Mohd. Soleh (pengulu/ketua tanfidziyah NU Boyolali).

Masing-masing perwakilan dari ketiga cabang ini kemudian membagi tugas, baik waktu jadwal (*shift*) tugas maupun penyediaan fasilitas. Untuk pembagian waktu, selama hampir seminggu pelaksanaan muktamar, ada yang hanya mengambil tugas untuk satu hari saja, ada yang dua hingga tiga hari, serta ada pula yang siap mengambil tugas pelayanan penuh selama muktamar berlangsung.

Berbagai keperluan yang disiapkan untuk para tamu, di antaranya bantal guling disediakan dari cabang Boyolali, Klaten dan Solo. Sedangkan untuk tikar, babut (*karpét*), damkar, dan lain-lainnya diusahakan oleh cabang Solo. Semuanya ini disediakan dengan gratis.

Syahdan, ada sebuah kisah menarik terkait tempat penginapan para peserta muktamar. Ketika itu, para tamu undangan, telah disediakan tempat penginapan. Pihak panitia sendiri sudah memesan beberapa tempat penginapan untuk menjadi tempat istirahat para peserta dari luar kota.

Meski demikian, banyak pula dari para kiai, yang justru lebih memilih untuk tinggal di rumah sahabat mereka, atau pondok pesantren yang ada di dekat lokasi muktamar. Salah satunya KH Bisri Syansuri pengasuh pesantren Denanyar Jombang, yang lebih memilih tinggal di pesantren yang diasuh KH Ahmad Siradj Panularan.

Singkat cerita, rupanya pondok pesantren tersebut belum memiliki nama, dan akhirnya, atas usulan dari Kiai Bisri, pesantren tersebut diberi nama Pesantren “Nahdlatul Ulama 001”. Pada perkembangannya, Pesantren “NU 001” tersebut lebih dikenal dengan nama Pesantren As-Siradj, dinisbatkan kepada nama sang pendiri pesantren, Kiai Ahmad Siradj.

Penulis: Aje Najmuddin

Editor: Fathoni Ahmad

Muktamar Ke-10 NU (2): Syiarkan NU Lewat Radio

Penyelenggaraan Muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Solo, pada tanggal 13-19 April 1935, selain membahas tentang hukum mendengarkan dan memiliki radio, juga untuk pertama kalinya kegiatan besar NU disiarkan secara langsung melalui corong radio.

Adanya siaran dari radio ini, tentu menjadi peluang berharga, untuk semakin mengenalkan NU kepada khalayak luas. Di sisi lain, penggunaan alat radio pada penyelenggaraan muktamar ini, menjadi pertanda bahwa ulama NU tidak bersifat kaku terhadap perkembangan teknologi.

Setiap sore hari, yakni pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00, para peserta muktamar mendapat kesempatan untuk berpidato dan diperdengarkan ke seluruh penjuru dunia melalui radio S.R.V (Solossche Radio Vereniging) Mangkunegaran dan Radio S.R.I (Siaran Radio Indonesia) milik Keraton Kasunanan.

Pada tahun 1935 tersebut atau di masa Kadipaten Praja Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara VII, baru saja dibangun dan diresmikan sebuah studio baru SRV di Kestalan. Studio ini, setelah Indonesia merdeka menjadi RRI Surakarta.

Selama penyelenggaraan muktamar atau kongres, juga dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang tidak hanya diikuti para peserta muktamar, tetapi juga masyarakat sekitar. Seperti kegiatan shalat hajat secara berjamaah yang dilaksanakan selama dua kali, yakni di Masjid Mangkunegaran pada malam Kamis (14 Muharram) dan Masjid Agung Kasunanan pada malam Jumat (15 Muharram).

Usai shalat hajat kemudian dilanjutkan dengan acara *Openbaar* (pengajian umum). Pada saat penyelenggaraan *Openbaar* yang pertama, yakni malam Kamis sekitar pukul 23.00 malam, KH Hasyim Asy'ari beserta rombongan tiba di lokasi Kongres (Mangkunegaran).

Kemudian pada *Openbaar* di hari kedua, bertempat di Masjid Agung Surakarta. Kegiatan ini disiarkan pula oleh radio S.R.I (Siaran Radio Indonesia) milik Keraton Kasunanan. Acara dibuka oleh KH Abdul Wahab yang naik ke atas mimbar dan dengan diiringi bunyi meriam sebanyak tiga kali, maka secara resmi acara muktamar telah dibuka.

Penyelenggaraan Muktamar ke-10 sebagaimana tercatat lengkap dalam buku *Poeteosan Congres Nahdlatoel Oelama ka-10* di Solo Soerakarta Tanggal 13-19 April 1935 yang diterbitkan oleh Hoofd-Bestuur Nahdlatoel Oelama' (HBNO), dihadiri 516 orang, dengan rincian: 140 ulama, 176 utusan bagian tanfidziyah, dan 200 tamu pengiring.

Beberapa ulama besar dan tokoh yang hadir antara lain, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Abbas Cirebon, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ridlwan Semarang, Kiai Zuhdi Pekalongan, Kiai Ma'shum Lasem, Kiai Baidlowi Lasem, Kiai Solih Tayu, Kiai Manshur Batavia, Kiai Yasin Menes, Kiai Abdurrahman Menes, Kiai Abdurrahman Pasuruan, Kiai Munawir Pekalongan, Kiai Fakih, Kiai Husain Bandung, Kiai Hambali Kudus, Kiai Imam Yogya, dan Sayyid Muhammad Palembang.

Kemudian ulama dari Solo dan sekitarnya antara lain Kiai Raden Adnan Hoofd Penghulu Kasunanan Solo, Kanjeng Penghulu Kasunanan Solo, Katib Imam Solo, Hoofd Penghulu Mangkunegaran Solo, Kiai Mas Dimiyathi Solo, Kiai Masyhud, Kiai Abu Amar, dan lain-lain.

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Fathoni Ahmad

Muktamar Ke-10 NU (3-Habis): Beberapa Putusan Penting Muktamar 1935

Muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Solo, pada tanggal 13-19 April 1935, terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran yang menyediakan tempat untuk tempat rapat maupun acara yang bersifat umum seperti pengajian akbar yang diselenggarakan di Masjid Agung Surakarta.

Kemudian, cabang-cabang di sekitar Solo seperti Boyolali dan Klaten, juga turut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk para tamu undangan dan peserta muktamar. Para warga juga dengan suka rela turut menginfakkan uang dan beberapa harta benda yang mereka miliki, untuk *ngalap* berkah dari acaranya para ulama ini.

Dari catatan laporan *Origineel Verantwoording* (akuntabilitas) Kongres jang ke 10, dana sebanyak f 984.075 (gulden) berhasil dikumpulkan dari berbagai donatur untuk membantu suksesnya acara muktamar. Dana tersebut antara lain berasal dari oewang *borg* (tabungan) penduduk di Solo, Boyolali dan sekitarnya. Kemudian dari kassier Hadji Joesoep di Solo, lalu derma dari *lid* (anggota) BUS (tjelengan di Solo), dan yang paling besar yakni pendapatan dari *lijst* Derma sebanyak f 742.87 (gulden).

Ini menjadi bukti organisasi NU didirikan dan dikembangkan atas dasar kemandirian dan partisipasi dari warga, bukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. NU memang dikenal sebagai salah satu organisasi yang bersikap sangat antipati terhadap penjajah. Sikap keras tersebut, seperti yang diperlihatkan dari seorang ulama di Solo, KH Masyhud, yang melarang keluarga serta santrinya agar tidak menjadi *ambtenaar* (pegawai pemerintah Hindia Belanda).

Kota Solo sendiri meski ditunjuk menjadi tuan rumah, namun sebetulnya organisasi NU di Kota Bengawan tersebut belum berkembang pesat. Seperti yang termaktub dalam buku *Poeteosan Congres Nahdlatoel 'Oelama' ka 10* di Solo Soerakarta Tanggal 13-19 April 1935 yang diterbitkan oleh Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO).

Di depan forum muktamar, perwakilan dari NU Solo Kiai Masruri menerangkan, perkembangan NU di Kota Solo pada waktu itu belum terlalu maju, karena beberapa hal. Namun, telah memiliki Madrasah Ibtidaiyah yang siswanya berjumlah enam puluh dua. Kemudian, juga telah mendirikan 3 *kring*, yakni Salam, Margoyoso, dan Sawo Boto.

Berbeda dengan Solo, dua cabang yang telah berdiri di wilayah Surakarta lainnya, Boyolali dan Klaten justru mengalami perkembangan yang lebih baik. NU Klaten yang diwakili oleh KH Abdul Mannan menerangkan perkembangan NU di sana. Saat itu, NU Klaten telah memiliki 300 anggota, 3 *kring*, 1 madrasah yang memiliki 100 murid, 20 *mubalighin* dan 10 *mubalighat*. Kemudian, setiap malam Selasa terdapat jadwal *nasihin*, dan Jumat siang jadwal *nasihat* (kaum perempuan). Juga *i'adah syahriah* yang telah mencukupi dan bahkan mampu setor kepada HBNO.

Dari semua cabang yang ada di wilayah Karesidenan Surakarta, NU Boyolali lah yang paling maju. Dilaporkan oleh Tuan Haji Utsman, saat itu, NU Boyolali telah memiliki anggota berjumlah 1405 orang. Kemudian memiliki 25 *kring*, 6 madrasah, dan mengurus 13 masjid. Juga mengadakan kursus/pelatihan untuk kaum ibu setiap malam Ahad dan kursus *nasihin* setiap malam Kamis.

Hasil putusan muktamar

Beberapa poin penting yang dibahas dan diputuskan pada Muktamar ke-10 tersebut antara lain mengesahkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) wadah pemuda Ansor Nahdlatoel Oelama' (ANO) yang berdiri pada tahun 1934, serta membentuk sebuah komisi untuk mengawal pendirian ANO yang

terdiri dari: KH Tohir (Surabaya), KH Mahfud Siddik (Jember), Kiai Abdullah Obeid (Surabaya), Kiai Adnan (Gresik), dan KH Abdul Wahab Hasbullah (Surabaya).

Selain itu, yang tidak kalah penting, yakni terdapat keputusan yang menegaskan dukungan untuk Madrasah Mambaul Ulum. Dukungan ini menjadi penting, ketika pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan pejabat yang berwenang mengurus soal agama Islam. Bagi para ulama NU, keberadaan Mambaul Ulum perlu dipertahankan sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk mencetak calon tenaga penghulu *landraad* dan *raad* Agama.

Dukungan NU kepada Mambaul Ulum ini pun tepat. Sebab keberadaan Madrasah Mambaul Ulum pada masa itu telah memberikan dampak yang luas, di mana ia tidak hanya menjadi tempat untuk mengajarkan agama Islam semata. Lebih dari itu, keberadaannya memiliki fungsi.

Pertama, pengingat keanekaragaman kepercayaan dan sistem nilai. *Kedua*, berperan dalam membangun identitas Islam di Hindia Belanda. *Ketiga*, aparat ideologi Islam terpenting untuk menjawab diskriminasi dan penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda. *Keempat*, benteng perjuangan terakhir untuk mempertahankan eksistensi masyarakat Islam di Hindia Belanda.

Setelah hampir seminggu di Kota Surakarta, pada akhirnya waktu jua yang membatasi para muktamirin untuk membahas pelbagai persoalan yang ada. Sebelum pulang, mereka mengikuti prosesi penutupan yang dilangsungkan di Masjid Agung Surakarta dengan acara Pengajian Akbar yang diisi oleh KH Fakhri Maskumambang dari Gresik Jawa Timur.

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Fathoni Ahmad

Sumbangan Kiai Hasyim Asy'ari pada Muktamar Menes

Posisi Menes yang berada di ujung kulon Pulau Jawa yang terpencil itu agak menyulitkan para peserta Muktamar ke-13 NU yang diselenggarakan tahun 1938 itu. Apalagi kendaraan umum waktu itu belum cukup tersedia. Mobil masih bisa dihitung dengan jari. Jaringan kereta api tidak sampai ke sana, maka delman menjadi transport andalannya. Bahkan ada peserta dari Surabaya yakni Abdullah Ubaid yang nekat naik sepeda motor.

Kenyataan ini disadari betul oleh Ketua PBNU KH Machfudz Siddiq, sehingga mengajak *muktamirin* untuk menerima fasilitas dan konsumsi apa adanya. Tempat ini dipilih selain perjuangan dari Cabang Menes juga untuk menunjukkan NU peduli dengan masyarakat kota dan rakyat yang ada di pedesaan.

Hal itu pula yang membuat Rais Akbar KH Hasyim Asy'ari berhalangan hadir ke tempat bersejarah itu, karena kesehatannya sedang kurang baik. Padahal sebagai pimpinan tertinggi NU tentu saja ingin berangkat ke sana. Tetapi kendali muktamar diserahkan pada trio pemimpin NU yakni KH Wahab Chasbullah, KH Machfudz Siddiq (ketua tanfidziyah saat itu), dan KH Wahid Hasyim. Itupun masih didampingi sesepuh seperti Kiai Asnawi Kudus, ditambah para sesepuh yang ada di seantero Banten, seperti Kiai Muhammad Rois, sehingga Muktamar tetap santer gaungnya. Apalagi Kiai Hasyim tetap juga mengirimkan pidato tertulisnya untuk memberikan arahan pada *muktamirin*.

Sebagai komitmen pada jamiyah itu, maka Hadratussyekh Hasyim Asy'ari mendermakan uang sebesar 30 rupiah, uang itu semestinya untuk bekal ke sana, suatu jumlah yang amat banyak. Selain itu juga banyak ulama lain yang memberikan sumbangan, seperti Rais Syuriyah NU Banten menyumbang sebesar 10 rupiah, lalu KH Ismail Pandeglang menyumbang 120,68 rupiah. Total kontribusi

dari wilayah dan cabang mencapai 471 rupiah. Belum lagi ditambah dengan bantuan *in natura* dari masyarakat berupa beras, gula, minyak goreng, kerbau sapi, sayuran kue dan sebagainya yang ditaksir sekitar 100 rupiah. Dengan demikian mukhtar telah memperoleh dana cukup, yang seluruhnya ditopang warga Nahdliyin sendiri. Tanpa adanya sumbangan dari penjajah Belanda.

Biaya itu selain untuk menjamu para *mukhtar*, juga digunakan untuk membangun berbagai gedung dan panggung pelaksanaan mukhtar yang anggun dan megah, sehingga kota kecamatan yang terpencil itu dihadiri oleh umat Islam seluruh Nusantara. Mengingat pentingnya kemandirian dana itu, maka bisa dipahami kalau Mukhtar Menes ini paling serius dalam membahas persoalan ekonomi, mulai pertanian, perdagangan hingga perbankan Islam.

Bahkan para pejabat tinggi wilayah itu hadir dalam pembukaan seperti Patih Pandeglang, Wedono Serang, termasuk Wedana Menes. Bahkan banyak di antaranya yang tertarik mengikuti seksi demi seksi persidangan. Mukhtar itu juga dipantau oleh seorang orientalis terkenal yaitu Dr. Pijper, yang saat itu menjabat sebagai kepala *Adviseur voor Inlandsche Zaaken* (Penasehat Urusan rakyat Pribumi) yang menulis banyak tentang perkembangan Islam awal abad ke-19 hingga abad ke-20.

Dengan penyelenggaraan mukhtar di kota terpencil yang sebelumnya tidak cukup dikenal, tiba-tiba kota itu dikenal di seluruh Hindia Belanda sebab kegiatan dan keputusan mukhtar itu disiarkan oleh berbagai koran yang berbahasa Melayu dan Belanda. Koran yang terkenal seperti *Pemandangan* ikut menyiarkan berita Mukhtar ini. Belum lagi surat kabar yang diterbitkan NU sendiri seperti *Berita Nahdlatol Oelama* dan sebagainya.

Sumber verslag Mukhtar Menes 1938 dan beberapa riwayat yang disampaikan oleh KH Hafid Usman dari Menes.

Kiai Abdul Mannan, Wakil Klaten di Muktamar NU Tahun 1935

Nama Kiai Abdul Mannan tercatat pernah beberapa kali mewakili NU Cabang Klaten di perhelatan Muktamar NU. Dari data laporan muktamar NU yang dimiliki penulis, sejak muktamar NU yang pertama pada tahun 1926, nama Kiai Abdul Mannan dari Klaten tercantum dua kali, yakni pada penyelenggaraan muktamar NU di Kota Surakarta (tahun 1935) dan Surabaya (1940).

Sebagaimana tertulis dalam buku *Poetoesan Congres Nahdlatoel 'Oelama' ka 10 di Solo Soerakarta Tanggal 13-19 April 1935* yang diterbitkan oleh Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama' (HBNO), acara ini diikuti dihadiri 516 orang, dengan rincian: 140 ulama, 176 utusan bagian tanfidziyah, dan 200 tamu pengiring. Beberapa ulama besar dan tokoh yang hadir antara lain: Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Abbas Cirebon, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ridlwan Semarang, Kiai Zuhdi Pekalongan, Kiai Ma'shum Lasem, dan lain-lain.

Dalam sebuah sesi, tiap daerah kemudian diminta untuk melaporkan perkembangan NU. Pada saat giliran NU Klaten, Kiai Abdul Mannan menjadi juru bicara untuk menerangkan keadaan NU di daerah tersebut. Dalam pemaparannya, NU Klaten pada tahun 1935, telah memiliki 300 anggota, 3 *kring*, 1 madrasah yang memiliki 100 murid, 20 *mubalighin* dan 10 *mubalighat*. Kemudian, setiap malam Selasa terdapat jadwal *nasihin*, dan Jumat siang jadwal *nasihat* (kaum perempuan). Juga *ianah syahriah* yang telah mencukupi dan bahkan mampu setor kepada HBNO.

Kemudian, 5 tahun berselang setelah Muktamar NU di Kota Surakarta, tepatnya pada pelaksanaan Muktamar ke-15 di Surabaya, dalam daftar peserta Muktamar nama Kiai Ngabdoelmanan tercatat mewakili NU Klaten sebagai syuriyah, didampingi pengurus

tanfidziah NU Klaten, Atmosoedarso. Berbekal, dua data inilah penulis kemudian mencoba untuk mencari tahu tentang riwayat hidup Kiai Abdul Mannan Klaten.

Keturunan Singa Waspada

Saya mulai mencari keluarga Kiai Abdul Mannan, yang menurut keterangan dari Ketua LTN-NU Klaten Minardi, berada di daerah Pengkol, Kaligawe, Pedan, Klaten. Di sana, saya bertemu dengan salah satu cucu Kiai Abdul Mannan yang bernama Bambang Riyadi. Bambang merupakan putra dari Ummul Albab binti Kiai Abdul Mannan. Rumah Bambang, hanya berjarak sekitar 50 meter dari “Ndalem Sepuh”, yang dulu ditempati oleh Kiai Abdul Mannan dan para leluhurnya.

“Kiai Abdul Mannan (memiliki nama kecil Amir) merupakan adik dari Kiai Abu ‘Ammar, yang pernah menjadi pengasuh Pesantren Jamsaren Solo,” terang Bambang Riyadi, saat saya temui di rumahnya, sekitar satu tahun yang lalu (23/9/2019).

Keduanya, Kiai Abdul Mannan dan Kiai Abu ‘Ammar, merupakan putra dari Kiai Abdul Ghoni bin Kiai Maulani bin Kiai Muqoyyad bin Kiai Muqdi (Muqowi) bin Kiai Fatuhudin (Gumantar Juwiring) bin Kiai Dipokerti (berasal dari Ponorogo, dekat dengan Kiai Besari). Selain Kiai Abu ‘Ammar dan Kiai Abdul Mannan, putra-putri Kiai Abdul Ghoni lainnya yakni Nyai Sayuti dan Kiai Umar, yang merupakan anak nomor pertama dan kedua.

Kakek mereka yang bernama Kiai Muqoyyad menjadi salah satu panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830) yang bergelar Singa Waspada. Di wilayah Klaten, Kiai Muqoyyad yang memiliki senjata bernama Kiai “Royyan” berjuang bersama Kiai Imam Rozi (Singa Manjat). Dalam perjuangannya, ia gugur dan dimakamkan di daerah Juwiring.

Ketika masih muda, Abdul Mannan selain berguru kepada ayahnya juga nyantri ke Pesantren Tempursari Klaten di bawah asuhan Kiai Zaid. Kemudian ia melanjutkan belajar ke Pesantren Jamsaren Solo yang diasuh Kiai Idris, yang juga putra dari gurunya di Tempursari. Ia juga nyantri di Pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari dan di Pesantren Kadirejo Karanganyar kepada Kiai Ahmad.

Di Jamsaren, ia dan kakaknya mengaji kepada Kiai Idris. Di sela waktu belajarnya, ia juga diberi tugas untuk menjaga perpustakaan Madrasah Mambaul Ulum. Sedangkan, sang kakak (Kiai Abu 'Ammar) menjadi menantu Kiai Idris dan sepeninggal Kiai Idris (wafat tahun 1923), estafet sebagai pengasuh Pesantren Jamsaren bahkan dipercayakan kepadanya (Kiai Abu 'Ammar wafat tahun 1965 dan digantikan Kiai Ali Darokah).

Selepas nyantri ke berbagai pesantren tersebut, Abdul Mannan kembali ke Pengkol untuk melanjutkan perjuangan dakwah sang ayah. Di sebuah mushala yang sudah dibangun kakeknya sejak sekitar tahun 1800-an, ia mengajar masyarakat sekitar, bahkan hingga ke Batur Ceper. Ia juga ditunjuk menjadi penghulu di Kecamatan Pedan.

“Saya pernah ikut pengajian Simbah (Kiai Abdul Mannan, pen), yang saya ingat waktu itu lampunya masih pakai lampu sentir, suguhannya jajanan *karak* dan wedang gula jawa,” kenang Bambang, yang pada saat saya wawancara, sudah berusia 64 tahun.

Seperti yang telah dipaparkan di awal tulisan ini, Kiai Abdul Mannan ikut aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan tercatat pernah mewakili NU Cabang Klaten di beberapa momen muktamar NU, di antaranya tahun 1935 dan tahun 1940. Di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, Klaten bersama Surakarta dan Boyolali memang ikut termasuk sebagai cabang perintis dan terlibat dalam aktivitas organisasi, baik di sekup lokal maupun nasional.

Perwakilan dari Surakarta, seperti Kiai Siradj dan Kiai Mawardi bahkan tercatat hadir sejak muktamar NU yang pertama di Surabaya tahun 1926. Kemudian, NU Boyolali, baru tercatat di ajang muktamar, tiga tahun setelahnya, yang diwakili oleh Kiai Raden Ng. Soleh. Sedangkan NU Klaten, baru terlibat ketika diselenggarakan Muktamar ke-X di Surakarta. Pada Muktamar tersebut, tidak dijelaskan secara detail peran Kiai Abdul Mannan di NU Klaten, apakah sebagai syuriah atau tanfidziyah.

Pada muktamar NU tahun 1939 di Magelang, tak jauh dari Klaten, tidak terdapat nama Kiai Abdul Mannan. NU Cabang Klaten mengirimkan beberapa wakilnya, yang tercatat dalam buku laporan muktamar, yakni Kiai Mataram Moch. Chamdani (syuriah) dan Tjokro Soedarmo (tanfidziyah). Baru setahun kemudian, tahun 1940, ketika muktamar NU diselenggarakan di Surabaya, Kiai Abdul Mannan tercatat ikut menghadiri sebagai syuriah dari Cabang NU Klaten.

Dari beberapa catatan yang penulis temukan tersebut, di antaranya peran sebagai juru bicara utusan NU Cabang Klaten di ajang muktamar, memperlihatkan peran yang besar Kiai Abdul Mannan di lingkup NU Klaten. Terutama posisinya sebagai syuriah NU Klaten, di masa menjelang kemerdekaan Indonesia.

Tentang kisah perjuangannya bersama NU ini, syahdan pada saat muktamar NU dilangsungkan di Malang, Jawa Timur, Kiai Abdul Mannan ikut menghadirinya, dengan *ngonthel* (naik sepeda) dari Klaten ke Malang. “Saya *diceritani* Ibu saya, Simbah dulu pernah berangkat ke Muktamar NU di Malang, *ngonthel*,” kata Bambang.

Darah pejuang dari sang kakek, ikut mengalir kepada Kiai Abdul Mannan. Di masa perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ia ikut membantu perjuangan Hizbullah, Sabilillah, dan Barisan Kiai di wilayah Klaten dan sekitarnya. Rumahnya, bahkan dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi para pejuang Hizbullah dan Sabilillah. Selepas masa peperangan, Kiai Abdul Mannan

kembali kepada aktivitasnya sebagai pegawai di KUA. Ia juga masih mempertahankan aktivitasnya sebagai guru ngaji. Tahun 1972, di usia 83 tahun, Kiai Abdul Mannan wafat. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman yang terletak di sebelah barat Masjid Al-Ikhlas. *Lahu al-fatihah!*

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Abdullah Alawi

Menengok Persiapan Muktamar di Magelang 1939

Tidak lama lagi Muktamar ke-33 NU bakal digelar di Jombang Jawa Timur. Berbagai persiapan tentu telah dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara. Mulai dari soal lokasi, fasilitas, akses transportasi dan sebagainya.

Namun, seberapa banyak serta sulitnya persiapan yang dilakukan, tentu tak lebih sulit dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan panitia muktamar NU di masa lampau. Terlebih ketika dilaksanakan di zaman penjajahan. Salah satunya Muktamar ke-14 NU di Magelang yang dilaksanakan pada bulan Juli 1939, 76 tahun silam.

Seperti yang dikisahkan KH Saifuddin Zuhri dalam salah satu bukunya yang berjudul *Berangkat dari Pesantren* (BDP). Ketika itu, ayah Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin tersebut, yang sedang mengemban amanah sebagai Sekretaris Majelis Konsul NU Daerah Banyumas ikut terlibat dalam mempersiapkan terselenggaranya Muktamar NU.

Sehabis Muktamar ke-13 di Menes, Konsul R.H Mukhtar bekerja keras untuk “membabat hutan” serta meratakan jalan menuju ke muktamar Magelang, dengan didampingi oleh Sekretaris Majelis Konsul Kiai Ahmad Zuhdi, dibantu oleh Ketua NU cabang Purworejo KH Jamil dan Ketua Cabang Temanggung di Parakan, Mas Fandi. Konsul R.H. Mukhtar memasuki Kota Magelang yang baginya masih asing. Berhari-hari ia pelajari situasi dan kondisi Magelang dan sekitarnya, sesudah itu barulah direncanakan dari mana kerja harus dimulai. (BDP hal. 178)

Berbagai pendekatan kemudian dilakukan panitia untuk mensosialisasikan muktamar, dengan ikut meramaikan shalat berjamaah dan Jumat di beberapa tempat, mengunjungi berbagai pondok pesantren dan pengajian. Dengan berbagai usaha dan

sosialisasi tersebut, bangkitlah semangat para ulama di sekitar Magelang, pin para santrinya. Semangat mereka tergugah untuk menerima Muktamar NU.

Namun, yang lebih penting panitia juga telah mendapat dari para ulama besar di sekitar Magelang. Mereka adalah KH Dalhar Watucongol Muntilan, KH Raden Alwi Tonoboyo, KH Moh. Siraj Wates Magelang, dan KH Chudlori Tegalrejo. Dengan kata lain, panitia juga telah menemukan “empat pintu”, empat arah angin daerah Magelang dari keempat kiai tersebut.

Segala persiapan telah dilakukan dari panitia. Lalu, bagaimana soal dana penyelenggaraan? Dukungan dana rupanya tidak hanya mengandalkan para donatur. Beberapa hari sebelum pembukaan muktamar, masyarakat setempat secara berduyun-duyun mengunjungi kantor *Hoofd Committee Congress* (HCC) NU yang berpusat di Hotel Semarang Pecinan Magelang.

Mereka secara beriring-iringan memikul beras, sayuran, kayu bakar, menuntun beberapa ekor kambing dan membawa beberapa ekor ayam. Dalam pembukaan muktamar, sumbangan-sumbangan itu diumumkan. (BDP hal. 180)

Pada akhirnya, dengan semangat, restu dan dukungan dari berbagai pihak tersebut, selama seminggu (15 - 21 Juli 1939), Muktamar ke-14 NU di Magelang dapat terlaksana dengan lancar. (Ajie Najmuddin)

Diadaptasi dari buku KH Saifuddin Zuhri “Berangkat dari Pesantren”

Perempuan Asal Sunda Ini yang Pertama Kali Berpidato di Muktamar NU

Pada tahun 1946 ibu-ibu di kalangan Nahdlatul Ulama yang didorong para kiai mendirikan organisasi, Muslimat. Nyai Djuaesih adalah ketuanya pada periode 1950-1952. Meski menjadi sosok perintis Muslimat NU, ia tak begitu menonjol sebagai organisator. Dia lebih populer sebagai *mubalighah* dalam kepemimpinan Muslimat NU Jawa Barat.

Meski demikian, ia memiliki reputasi yang tak dimiliki banyak perempuan NU karena dialah perempuan pertama yang naik ke mimbar resmi organisasi NU, tepatnya dalam forum persidangan Muktamar ke-13 NU di Menes, Banten tahun 1938. Disusul kemudian Nyai Siti Syarah, tokoh perempuan NU dari Menes.

Berikut ini laporan *Berita Nahdlatul Ulama* No 6 tahun ke-10 edisi 19 Januari 1941, hal.4/86

“Kemudian dari pada itu, tampillah ke muka, Ny Djuaesih, voorzitter (ketua) Muslimat NU Bandung yang telah memerlukan datang di kongres ini, berhubung kecintaan dan tertarik beliau kepadanya.

Dengan panjang lebar menerangkan akan asas dan tujuan dari NU adalah suatu perkumpulan yang sengaja mendidik umat Islam ke jurusan agamanya dengan seluas-luasnya. Di dalam agama Islam bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik tentang soal-soal yang berkenaan dengan agamanya, bahkan kaum perempuan juga harus mendapat didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntunan agama, sebagaimana lakinya. Inilah nantinya yang akan dapat membawa keamanan dunia dan akhirat.”

Djuaesih lahir pada Juni 1901 di Sukabumi. Ia tidak mengikuti pendidikan formal dan hanya belajar kepada orang tuanya R.O. Abbas dan R. Omara S yang membekalinya dengan ilmu agama.

Djuaesih memiliki kemampuan alamiah sebagai *mubalighah* dan cukup terkenal di Jawa Barat. Ia sering memberikan ceramah agama bagi ibu-ibu di berbagai pelosok Jawa Barat seperti di Pandeglang, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis, dan Bekasi.

Persentuhannya dengan NU muncul setelah menikah dengan Danuatmadja alias H. Bustomi, seorang pengurus NU Jawa Barat. Dalam berbagai acara organisasi ia menyertai suaminya. Ia pun merasa bahwa NU perlu mengorganisasi para perempuannya agar bisa ikut bersama-sama berdakwah.

Djuaesih mempunyai sumbangan besar dalam gerakan perempuan di lingkungan NU dengan gagasannya mendirikan organisasi khusus bagi kaum hawa di lingkungan NU.

Menurutnya, NU mempunyai kewajiban untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam, dan itu bukan hanya tanggung jawab kaum pria. Karena itu, ia mengusulkan agar perempuan NU dapat menjadi anggota dan aktif serta memiliki wadah organisasi sendiri.

Dalam forum Muktamar NU di Menes tersebut, sebagaimana dilukiskan Mahbib Khoiron yang mengutip *50 Tahun Muslimat NU, Berkhidmat untuk Agama, Negara & Bangsa*, 1996 (Jakarta: PP Muslimat NU), Djuaesih menyatakan,

"Di dalam agama Islam, bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita juga wajib mendapatkan didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kaum wanita yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mesti bangkit..."

Meski pun menjadi salah satu perintis organisasi perempuan NU, ia tidak menduduki jabatan tertentu pada kepengurusan pertama Muslimat NU Jawa Barat. Baru pada periode 1950-1952 Djuaesih menjabat sebagai ketua.

"Di dalam Islam bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita pun

wajib mendapatkan didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kami wanita yang tergabung dalam NU mesti bangkit.”
(Abdullah Alawi)

Muktamar NU 1962 (Bagian 1)

Pada ujung tahun 1962, untuk kali kedua, Kota Solo dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Sebelumnya, pada tahun 1935, di Kota Bengawan juga pernah dihelat penyelenggaraan muktamar NU yang kesepuluh.

Buku *Petundjuk Mu'tamar ke-XXIII Partai Nahdlatul Ulama* yang diterbitkan Sekretariat Panitia Muktamar ke-23 NU (1962), memberi banyak gambaran menarik terkait dinamika muktamar yang diadakan di tengah situasi politik di dalam negeri yang semakin hangat dengan adanya Kabinet Nasakom, juga masih dalam semangat Trikora (Tri Komando Rakyat).

Sebelumnya, telah dibentuk sebuah kepanitiaan yang memadukan para pengurus NU, baik dari pusat, wilayah (Jawa Tengah) dan wilayah Karesidenan Surakarta. Adapun susunan panitia sebagai berikut:

Pelindung:

1. KH Wahab Chasbullah (Rais Aam)
2. KH Idham Chalid (Ketua PBNU)

Penasihat:

1. KH Ma'ruf (Pengasuh Pesantren Jenengan/Rais Syuriah PCNU Surakarta)
2. KH Dimiyati al-Karim (Madrasah Salafiyah Mangkunegaran/ pernah menjadi Syuriah PBNU)
3. KH Ahmad Umar Abdul Mannan (Pengasuh Pesantren Mangkuyudan)
4. KH Hilal (Rais Syuriah PCNU Sukoharjo), KH Imron Rosjadi (PBNU)
5. KH Jasin (Menantu KH Manshur Popongan/PCNU Surakarta)
6. KH Asy'ari (Tegalsari Laweyan/ PCNU Surakarta)

Supervisor:

1. KH Munir Abisudjak
2. Mursjidi Effendi
3. Nyai Hj Mahmudah Mawardi (Ketua PP Muslimat NU/ Asli Keprabon Solo)
4. Wirjosumarto

Ketua Umum: H Imam Sofwan (Ketua PWNU Jateng)

Ketua I: KH Muchtar Rosjidi (Ketua Tanfidziyah PCNU Surakarta)

Dan seterusnya..

Muktamar dilaksanakan di kompleks Ndalem Kusumojudan (kini Kusuma Sahid Prince Hotel). Sedangkan acara resepsi pembukaan Muktamar digelar di Gedung Balai Kotapradja Surakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid menyitir salah satu kalimat orang Jawa *alon-alon jen kelakon*.

Menurutnya, di situasi politik era Demokrasi Terpimpin, kala itu, mesti hati-hati dalam mengambil sikap. Sebab, NU diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tidak didirikan untuk masa singkat, tetapi untuk jangka panjang.

“... *Alon-alon* bukan karena kemalasan dan kelambatan, tetapi karena kebidaksanaan dan pertimbangan yang teliti. *Alon-alon* jang berarti tidak grusa-grusu. Tidak terburu-buru asal bertindak dengan tanpa perhitungan akal jang sehat. *Alon-alon* karena sadar bahwa jang akan dibangun bukan rumah dari bambu untuk menginap sementara, tetapi jang menjadi tudjuan ialah gedong yang besar, kukuh, teguh, berangka besi beton jang tak lapuk karena hudjan, tak laju karena panasnja masa!

(Bersambung)

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Abdullah Alawi

Muktamar NU 1962 (Bagian Ke-2/Habis)

Di era 1960-an, istilah penentangan terhadap neo-kolonialisme (Nekolim) cukup mencuat, terutama setelah Presiden Soekarno mencetuskan politik konfrontasi atas pendirian Federasi Malaysia, yang dinilai sebagai proyek imperialisme Inggris. Semangat tersebut juga muncul dalam Muktamar ke-23 di Kota Solo.

Slogan-slogan bernada anti-imperialisme dan anti-neokolonialisme seperti *Menentang Pemerasan, Pengisapan, Riba, dan Kapitalisme Matjam Apapun Djuga, Menentang Pengaruh Kebudajaan Jang Merusak Ahlaq, dan Menentang Kolonialisme, Dictatuur, dan Imperialisme dari Manapun Djuga*, menghiasi di beberapa sudut lokasi Muktamar, juga di buku panduan untuk peserta.

Bung Karno, pada saat menyampaikan pidato di depan para peserta muktamar, 28 Desember 1962, menyinggung peran penting NU dalam upaya perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas saran yang telah diberikan Kiai Wahab yang dikenal dengan “Diplomasi Cancut Tali Wondo”.

“Baik ditinjau dari sudut agama, nasionalisme, maupun sosialisme. NU memberi bantuan yang sebesar-besarnya. Malahan, ya memang benar, ini *lho* pak Wahab ini bilang sama saya waktu di DPA dibicarakan berunding apa tidak dengan Belanda mengenai Irian Barat, beliau mengatakan: jangan politik keling. Atas advis anggota DPA yang bernama Kiai Wahab Hasbullah itu, maka kita menjalankan Trikora dan berhasil saudara-saudara!”

Ia pun tak lupa menyampaikan ungkapan kecintaannya kepada NU, seperti halnya yang sering ia lakukan kala memberi sambutan saat diundang organisasi lain.

“... Saudara-saudara sesudah bersenda gurau demikian saya *Insyallah* hendak memberi amanat pada Mu'tamar Nahdlatul Ulama.

Sekarang hari Jumat, sehingga amanat saya itu tidak dan tidak boleh melewati jam 12... Saya sangat cinta sekali kepada NU. Saya sangat gelisah jika ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak cinta kepada NU. Meski harus merayap, saya akan tetap datang ke muktamar ini, agar orang tidak meragukan kecintaan saya kepada NU!”

Sementara itu, Rais Aam PBNU Kiai Wahab Chasbullah dalam pidatonya, berharap muktamar kali ini menjadi pendorong yang kuat bagi NU agar terus berkembang maju di seluruh pelosok tanah air. Ia juga mengingatkan akan pentingnya persatuan, khususnya di kalangan umat Islam.

“... Perdjuaan dan pekerdjaan serta tanggung djawab didasarkan atas hadist Rasulullah SAW jang artinya: “Umat Islam itu semisal satu badan, apabila salah satu anggauta mengeluh kesakitan akan terasalah seluruh badan dengan rasa demam dan kurang tidur”. Dan sabdanja jang artinja: “Umat Islam itu semisal satu bangunan satu sama lain saling memperkuat”. Pun sabdanja pula jang artinja: “Dan selama Umat Islam berdiri tegak di atas agama Allah, selama itu pula tak akan dapat diganggu oleh siapapun jang menentangnja sampai besok hari kiamat”.

Demikianlah, Muktamar ke-23 NU di Kota Solo, yang kala itu masih dikuasai PKI, akhirnya dapat berjalan hingga selesai. Muktamar di Solo ini sekaligus menjadi muktamar yang terakhir di era Presiden Soekarno.

Pada tahun 1967, NU baru bisa menyelenggarakan muktamar berikutnya, ketika Soeharto sudah menjabat sebagai presiden, yang menandai lahirnya Orde Baru. Sebuah rezim yang justru melanggengkan sistem neo-kolonialisme di negeri ini. Dan perjuangan pun terus berlanjut...

... Hingga saat ini

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: Abdullah Alawi

Seputar Muktamar NU di Solo

Kota Surakarta atau biasa lebih dikenal dengan nama Kota Solo, tercatat sudah dua kali menjadi arena Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Bisa juga dikatakan tiga kali, akan tetapi yang terakhir pada tahun 2004, Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan masuk dalam wilayah Kab. Boyolali.

Penyelenggaraan yang pertama, terjadi pada 13-19 April 1935/10-15 Muharram 1354. Jumlah anggota NU yang terdaftar sampai muktamar ini adalah 68.000 orang dari 68 cabang se-Indonesia.

Pada Muktamar NU yang kesepuluh tersebut, selain masalah-masalah organisasi dan hukum-hukum agama, juga dibahas masalah penggunaan pesawat radio dan aneka ragam kesenian. Juga membuat resolusi menentang kebijaksanaan Belanda tentang pengangkatan pejabat Belanda yang mengurus soal agama Islam.

Sidang tanfidziyah dipimpin oleh KH Mahfud Shiddiq, sedang Syuiriyah dipimpin tiga ulama terkemuka, yaitu KH Wahab Chasbullah, KH R. Mohammad Adnan, dan KH Bisri. Ulama yang masyhur pada saat itu juga hadir dari pelbagai daerah, antara lain H Masyhud, KH Dimiyati, K Abu Amar, KHR Asnawi, Mohammad Sutisna Senjaya, dan KH Fakih.

Di antara hasil keputusan muktamar ini adalah pernyataan menyokong berdirinya “Madrasah Mamba’ul Ulum” yang didirikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, sebagai salah satu usaha untuk mencetak kader ulama.

Penutupan muktamar kesepuluh dilangsungkan di Masjid Agung Surakarta dengan Pengajian Akbar yang diisi oleh KH Fakhri dari Gresik Jawa Timur.

Pada penyelenggaraan yang kedua di Solo, 25-29 Desember 1962 bertepatan dengan 29 Rajab-3 Sya'ban 1382 H, mulai muncul suara-suara yang menghendaki NU tak lagi menjadi partai politik dan kembali menjadi *jam'iyah diniyah*. Pertentangan di kalangan tokoh-tokoh NU mulai memprihatinkan kalangan ulama. Akan tetapi setelah mengalami pelbagai macam hal, khittah NU ini baru terwujud pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo. (Ajie Najmuddin)

Muktamar NU Ke-23 dan Pengakuan Soekarno

Oktober 1962, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia. Salah satu daerahnya yang masih dikuasai Belanda, Irian Barat (Papua), akan segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah melalui sebuah perjuangan yang dikenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (Trikorra).

Pada tahun itu pula, Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Muktamar ke-23 di Surakarta (Solo), yakni pada 24-29 Desember 1962 atau 29 Rajab-3 Sya'ban 1382 H. Muktamar tersebut menjadi spesial dengan hadirnya Presiden Soekarno, yang dalam pidatonya menyatakan bahwa keberhasilan kembalinya Irian Barat tersebut berkat kontribusi besar dari NU.

Ketika itu, Rais Aam KH Wahab Chasbullah, yang juga menjabat di DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara), menyarankan beberapa hal kepada presiden; yang kemudian dikenal dengan istilah "Diplomasi Cancut Tali Wondo", yakni upaya untuk menggagalkan kekuatan lahir dan batin di segala bidang.

Atas saran Kiai Wahab tersebut, kemudian lahirlah Trikorra. Presiden Soekarno mengakui sumbangan besar dari NU tersebut. Soekarno menyatakannya pada saat berpidato di hadapan muktamirin di Solo:

*"Baik ditinjau dari sudut agama, nasionalisme, maupun sosialisme. NU memberi bantuan yang sebesar-besarnya. Malahan, ya memang benar, ini lho pak Wahab ini bilang sama saya waktu di DPA dibicarakan berunding apa tidak dengan Belanda mengenai Irian Barat, beliau mengatakan: jangan politik keling. Atas advis anggota DPA yang bernama Kiai Wahab Hasbullah itu, maka kita menjalankan Trikorra dan berhasil saudara-saudara. Pada 1 Oktober bendera Belanda turun di Irian Barat diganti bendera UNTEA. Dan 1 Mei 1963, bendera satu-satunya di Irian Barat adalah Merah Putih".** (Ajie Najmuddin)

*Disarikan dari DR. KH Idham Chalid, *Mendayung Dalam Taufan, 1966, Jakarta*

Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi Pancasila di Muktamar 1967

Ketika Pancasila telah diakui sebagai dasar negara maka setiap sistem yang di bangun di atasnya haruslah bersendikan pada dasar yang telah disepakati bersama, baik dalam politik budaya termasuk dalam demokrasi. Sejak kembali ke UUD 1945, Indonesia telah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian diterjemahkan dalam realitas oleh Bung Karno, sebagai bentuk demokrasi Indonesia. Demokrasi ini sendiri mengacu pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya demokrasi yang mengacu pada nilai dan cita-cita bersama bangsa ini.

Sejak awal NU yang diwakili KH Saifuddin Zuhri dan KH A Syaichu menegaskan bahwa NU menerima sistem Demokrasi Terpimpin asal penekanan tetap diletakkan pada demokrasi, bukan pada terpimpinnya. Karena tanpa adanya kepemimpinan demokrasi menjadi anarki, demikian juga tanpa demokrasi maka kepemimpinan menjadi represi. NU menginginkan adanya demokrasi yang terarah bukan demokrasi liberal yang tanpa arah, yang ada hanya suara bersama, yang mengabaikan prinsip dan moral. Hadirnya Demokrasi Terpimpin penting untuk mengatasi anarki politik yang ditimbulkan oleh demokrasi liberal zaman itu.

Ternyata pelaksanaan Demokrasi Terpimpin banyak mengalami penyimpangan, penekanan tidak pada demokrasi, tetapi pada pemimpinnya. Karena itu NU pada Muktamar Ke-24 NU di Bandung mengadakan tinjauan ulang terhadap Demokrasi Terpimpin itu. Bukan pada substansinya tetapi pada istilah serta bentuk penerapannya. NU berusaha mengembalikan demokrasi pada sumber dasarnya yaitu Pancasila.

Dengan asumsi semacam itu NU mengusulkan penggunaan istilah baru Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi atau kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan serta perwakilan. Pada dasarnya Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebebasan berdemokrasi dibatasi oleh *pertama*, batas keselamatan negara; *kedua*, kepentingan rakyat banyak; *ketiga*, kepribadian bangsa; *keempat*, batas kesusilaan; dan *kelima*, batas pertanggung-jawaban pada Tuhan. Setiap keputusan yang melanggar kelima batas itu dinyatakan batal secara moral dan politik. Demikian pandangan dan sikap NU terhadap politik dan demokrasi. Berikut adalah maklumat lengkap dari deklarasi pada muktamar tahun 1967 itu:

Deklarasi Demokrasi Pancasila

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh pertanggungjawaban kepada Allah *subhanahu wata'ala*, kepada perjuangan memenangkan Orde Baru untuk kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah seluruh bangsa Indonesia, Muktamar NU ke-24 di Bandung mengeluarkan Deklarasi Tentang Demokrasi Pancasila.

Mukaddimah

Penentangan terhadap ajaran Demokrasi Liberal pada hakikatnya penentangan terhadap suatu politik yang membuka kemungkinan timbulnya peranan perorangan dan kelompok kecil di dalam masyarakat yang dapat mencapai kekuasaan politik dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Penentangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme pada hakikatnya penentangan terhadap sistem politik yang membenarkan pencapaian kekuasaan melalui kekerasan dan dominasi berdasarkan kekuatan dari satu golongan terhadap golongan yang lain.

Penentangan terhadap ajaran Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya penentangan terhadap sistem politik yang menjurus kepada kekuatan perorangan dan segolongan kecil dengan

menggunakan predikat “terpimpin” sebagai cara untuk melenyapkan demokrasi setahap demi setahap sehingga sempurna.

Pembinaan Orde Baru dengan demikian pada hakikatnya adalah pembinaan demokrasi yang tidak menganut sistem Demokrasi Liberal, ajaran Marxisme-Leninisme maupun Demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini berdasarkan Pancasila atau “Demokrasi Pancasila”.

Sifat Umum Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih di dalam suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis.

Demokrasi Pancasila menolak semua bentuk kekuasaan dan kekuatan yang diperoleh dari lembaga perwakilan rakyat.

Mengakui hak mayoritas seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.

Di bidang agama, Demokrasi Pancasila mengakui hak dan kewajiban pemeluk mayoritas begitu juga hak dan kewajiban pemeluk minoritas sesuatu agama.

Demokrasi Pancasila

Lembaga Perwakilan Rakyat dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratik, dari representasi partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa yang terorganisir, yang mencalonkan wakil-wakilnya di dalam pemilihan umum.

Berdasarkan kondisi-kondisi objektif, sistem proporsional adalah sistem yang terbaik di dalam pemilihan umum.

Tentang Peranan Rakyat di Dalam Demokrasi Pancasila

Massa Rakyat yang terorganisir di dalam partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa adalah alat yang mutlak di dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya.

Partai politik dan lain-lain organisasi massa mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan politik ideologi masing-masing serta berjuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat di atas landasan Pancasila.

Bandung 10 Juli 1967

Sumber: Abdul Mun'im DZ (Editor), Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011 (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online)

Para Kiai Sepuh “Turun Gunung” Jelang Muktamar 1984

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-27 NU, para pemimpin NU terbelah dua: Kubu Cipete yang bermuara pada Ketua Umum PBNU KH Idham Cholid dan kubu Situbondo yang bermuara KH.R. As’ad Syamsul Arifin. Kubu Situbondo mengadakan munas, kubu Cipete juga membuat munas. Situasi seperti itu sudah terasa sepeninggal Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri (wafat Jumat 25 April 1980). Kubu Situbondo atau disebut juga kubu khittah didukung oleh kelompok muda yang sangat aktif di NU seperti Gus Dur.

Kubu Situbondo menggelar munas dengan menunjuk Gus Dur sebagai ketua panitia Muktamar ke-27. Kubu Cipete juga tak kalah menggelar munas dengan menunjuk Cholid Mawardi sebagai ketua panitia.

Dalam suasana politik represif Orde Baru, waktu itu Munas Situbondo menerima Pancasila sebagai asas. Munas Cipete juga menerima Pancasila sebagai asas, dan bahkan sudah lebih dulu diserahkan kepada pemerintah. Tetapi, pemerintah rupanya lebih menghargai hasil Munas Situbondo karena lebih konseptual, ketimbang Cipete yang cenderung sebagai manuver politik untuk mencari simpati pemerintah.

Namun setelah melihat sikap pemerintah mendukung kubu Situbondo, kubu Cipete mulai melunak. Dengan kebesaran hati para kiai sepuh, akhirnya kedua kubu dikumpulkan dalam sebuah acara ‘tahlilan’ di rumah KH Hasyim Latief, ketua PWNU Jawa Timur di Sepanjang, Sidoarjo (10 September 1984).

Di rumah KH Hasyim Latief itulah lahir sebuah maklumat bersejarah bernama “Maklumat Keakraban” yang ditandatangani tujuh ulama terkemuka: KH As’ad Syamsul Arifin, KH Ali Ma’shum,

KH Idham Cholid, KH Machrus Aly, KH Masjkur, KH Saifuddin Zuhri, dan KH Achmad Siddiq.

Isi maklumat pada intinya adalah mengakhiri konflik, saling memaafkan, dan bersepakat untuk menyukkseskan muktamar ke-27 di Situbondo, Desember 1984. Maka, berakhir sudah pertikaian antar dua kubu yang berlangsung tiga tahun lebih itu.

Para kiai sepuh merasa terpanggil terjun langsung mengatasi situasi kepemimpinan NU. Kemudian muncul pikiran tentang penggantian sistem pemilihan. Pemilihan langsung dalam menentukan rais aam diganti dengan sistem musyawarah para kiai seperti awal berdirinya NU yang dinamakan *ahlul halli wal aqdi*.

Namun dalam sistem ini mutlak diperlukan sosok kiai kharismatik yang bisa menjadi “ahlul aqdi” yang disegani dan dipercaya oleh semua pihak. Beruntung waktu itu ada KH As’ad Syamsul Arifin. Bersama para kiai sepuh lainnya, seperti Kiai Ali Ma’shum dan Kiai Mahrus Aly, Kiai As’ad memainkan peran dengan sangat baik.

Tidak ada kiai “*ahlul aqdi*” yang bersedia menjadi rais aam. Mereka menyerahkan kepemimpinan organisasi kepada KH Achmad Siddiq.

Muktamar 1984 berlangsung sukses. Kiai As’ad kembali ke pesantrennya di Asembagus. Kiai Mahrus Aly memilih menjadi syuriah di Jawa Timur saja. Bahkan Kiai Ali’ Ma’shoem sejak awal tidak pernah mau menjadi rais aam. Para kiai sepuh ‘*ahlul aqdi*’ kembali ke masyarakat. (A. Khoirul Anam)

Gus Dur dan Panasnya Muktamar NU Cipasung

Tidak terasa Muktamar ke-33 NU di Jombang sudah berakhir setahun yang lalu dengan terpilihnya KH Said Aqil Siroj sebagai ketua tanfidziah dan KH Ma'ruf Amin sebagai rais aam. Dengan terpilihnya kembali calon *incumbent* ini menunjukkan keberhasilannya memimpin NU selama lima tahun terakhir. Meskipun pro-kontra pasca-muktamar pada saat itu masih sangat panas hingga muncul menjadi pemberitaan di berbagai media nasional.

Membincang soal muktamar, persoalan di Muktamar ke-33 NU adalah hal biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi. Justru, Muktamar ke-29 NU yang digelar 1-5 Desember 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat lah sebagai muktamar yang paling menegangkan dan terpanas dalam sejarah NU. Mengapa? Pasalnya, pada muktamar ini merupakan puncak terjadinya kezaliman rezim Orde Baru terhadap NU. Pada saat itu, NU dan sosok Gus Dur dengan segala keberaniannya 'melawan' pemerintah, dipandang oleh Soeharto sebagai ancaman yang paling membahayakan.

Tak pelak, hal ini membuat Soeharto dengan kekuasaannya, ingin 'memutus' kewenangan Gus Dur di PBNU yang sejak tahun 1984 dipimpinnya. Salah satu cara yang ditempuh Soeharto adalah menumbangkan Gus Dur di Muktamar NU Cipasung. Presiden Soeharto melakukan berbagai intervensi dengan mendukung secara penuh salah satu calon ketua umum PBNU untuk melawan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai *incumbent*. Apa skenario yang dijalankan pada saat itu?

Ya, Soeharto memunculkan penantang dari internal NU sendiri yang pastinya anti-Gus Dur yakni Abu Hasan. Bahkan sang paman Gus Dur, KH Yusuf Hasyim, juga ikut terbawa menentang keponakannya itu. Oposisi Gus Dur inilah yang melakukan sejumlah agitasi dengan slogan ABG (Asal Bukan Gus Dur). Mereka mengemukakan kritik 'pedas' terhadap Gus Dur, yakni manajemen NU di bawah

kepemimpinan Gus Dur dinilai lemah dan otokratik. Bahkan, menurut mereka, langkah Gus Dur yang kerap kali 'berseberangan' dengan pemerintah dianggap bukan hanya menyimpang dari khittah NU, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan NU sendiri. Itulah berbagai isu yang mereka buat untuk mengambil hati seluruh muktamirin.

Gelaran muktamar itu juga terkungkung penjagaan militer, terlebih Presiden Soeharto sendiri, Panglima TNI Jenderal Faisal Tanjung, serta para menteri rezim Orde Baru turut hadir di forum tersebut. Tidak hanya personel militer dan sejumlah intel yang menyebar di seantero lokasi muktamar, kendaraan lapis baja juga ikut mengelilingi arena Muktamar Cipasung.

Beberapa dari mereka bahkan diketahui menyamar dengan seragam Banser. Dari berbagai sumber, sedikitnya, diketahui tentara yang berjaga di sekitar Cipasung berjumlah sampai 1.500 personel dan 100 intel. Sebagian dari mereka diberi tugas untuk memonitor delegasi-delegasi daerah dan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan.

Pada proses pemilihan, sempat menghadirkan empat calon. Selain Gus Dur dan Abu Hasan, ada juga nama Chalid Mawardi dan Fahmi Saifuddin yang ikut maju mencalonkan diri. Pada tahap awal, Gus Dur memperoleh suara 157 suara, Abu Hasan 136 suara, Fahmi Saifuddin 17 suara, dan Chalid Mawardi 6 suara. Situasi tersebut benar-benar di luar dugaan kubu Gus Dur yang semula diperkirakan akan memperoleh dukungan sekitar 65 persen. Akan tetapi, kenyataannya hanya memperoleh di bawah 50 persen.

Dengan enam suara Chalid Mawardi (juga kubu Soeharto) yang kemungkinan jatuh ke tangan Abu Hasan, maka pemilihan ketua umum ditentukan oleh 17 delegasi yang memberikan suara mereka kepada Fahmi Saifuddin. Kemungkinan kekalahan di putaran berikutnya dengan segala konsekuensinya jika NU jatuh ke tangan Abu Hasan sudah terbayangkan oleh kubu Gus Dur sehingga membuat mereka panik.

Beberapa kiai yang duduk dekat dengan Gus Dur bahkan banyak yang meneteskan air mata seraya berdoa dengan khusyu. Singkat cerita, berdasarkan perhitungan suara yang dilaksanakan hingga pukul 03.00, Gus Dur ternyata memperoleh 174 suara, sementara Abu Hasan hanya mendapatkan 142 suara. Kekhawatiran itu ternyata tidak berbuah kenyataan. Pendukung Gus Dur pun merayakan kemenangan dengan penuh sukacita dan rasa syukur.

Tentu kemenangan ini tidak diperoleh dengan cara yang instan, kehebatan, intelektualitas, dan kemampuan berpikir kritis yang berani melawan pemerintahan yang zalim pada saat itu, ditunjang dengan kebijakan-kebijakannya di internal NU yang dirasa sangat strategis untuk kemaslahatan masyarakat. *Social capital* inilah yang menjadi modal penting kepercayaan warga NU sekaligus menjadi investasi yang mengantarkannya menjadi ketua PBNU tiga periode berturut-turut.

Muhammad Faishol, *mantan wartawan Jawa Pos Radar Malang yang saat ini sebagai Chief Editor Media Santri NU (MSN)/mediasantrinu.com, santri Sholawatul Qur'an Banyuwangi dan Sabilurrosyad Gasek Malang.*

Peneguhan Pancasila dalam Muktamar NU 1984

Sebagai salah satu tokoh arsitek Khittah NU 1926 dan juga berperan penting dalam ikut merumuskan pondasi hubungan Islam dan Pancasila, KH Achmad Siddiq Jember menyampaikan sebuah pidato usai terpilih sebagai Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

Berikut salah satu cuplikan pidato Kiai Achmad Siddiq yang begitu berkesan bagi umat Islam Indonesia, khususnya Nahdliyin:

“Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para Ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.” (KH Husein Muhammad, *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*, 2015)

Ada tiga poin penting dalam pernyataan Kiai Achmad Siddiq tersebut. *Pertama*, negara bangsa (*nation state*).

Penerimaan para kiai yang mumpuni dalam ilmu agama dan mempunyai jiwa nasionalisme tinggi terhadap bentuk negara bangsa mempertegas bahwa Indonesia dengan mayoritas beragama Islam bukanlah negara agama, tetapi negara bangsa yang memegang teguh nilai-nilai agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila.

Kedua, negara kesatuan di wilayah Nusantara atau dengan istilah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalangan pesantren, santri dan kiai berkomitmen tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Sebab Indonesia didirikan di atas pondasi keberagaman atau kemajemukan bangsa yang terbentang di 17.504 pulau, serta mempunyai 1.340 suku, dan 546 bahasa daerah.

Spirit memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi pondasi kokoh bagi para ulama untuk terus menjaga dan merawat perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Cinta terhadap tanah air Indonesia bukan semata cinta buta, tetapi cinta yang dilandasi agama. Bahkan, Fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menyatakan dengan tegas bahwa membela Tanah Air merupakan kewajiban agama.

Dalam menjaga NKRI tersebut, NU sebagai *jam'iyah diniyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan) seperti dipertegas Kiai Achmad Siddiq di atas, bukan 'penjaga biasa', melainkan memperkuat dan merajut berbagai elemen bangsa untuk menyadari bahwa cinta tanah air merupakan salah satu upaya aktualisasi nyata keimanan seseorang.

Sehingga cinta tanah air berlaku untuk seluruh kaum beragama di Indonesia. Ini dicetuskan langsung oleh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang menyatakan, *hubbul wathon minal iman* (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Ketiga, penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Ada dua catatan sejarah penting dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo, ialah NU kembali ke Khittah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini pertama kali dilakukan oleh NU.

Bukan semata menyukseskan program rezim Orde Baru, tetapi lebih kepada misi bahwa Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu dipertegas menjadi pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial seperti yang dimaksud Kiai Achmad Siddiq.

Penulis: Fathoni Ahmad

Editor: Abdullah Alawi

Muktamar 1994 dan Jihad Lingkungan Hidup

Belum lama ini isu lingkungan menjadi pembicaraan publik. Bahkan sampai KH A Mustofa Bisri ikut bersama-sama warga masyarakat Rembang untuk menyuarakan keadilan dalam menjaga lingkungan. Terkait hal ini, warga ini bisa kembali merujuk pada keputusan Muktamar ke-29, di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994.

Dalam muktamar itu diputuskan bahwa pencemaran lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar* (kerusakan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).

Muktamar yang digelar di pesantren asuhan KH Ilyas Ruhiyat (Rais Aam PBNU, 1992-1999) ini merupakan bukti keteguhan NU yang berani lantang berjihad menjaga lingkungan hidup. Keputusan muktamar ini bukan saja menetapkan hukum haram, tetapi juga mengategorikan sebagai kriminal, alias masuk juga dalam ranah hukum positif. Dengan begitu, merusak lingkungan bukan saja mendapatkan stempel “haram” dari agama, tetapi harus mendapatkan “hukuman” yang setimpal dari negara.

Pada 23 Juli 2007, PBNU juga kembali menegaskan melalui Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNHLN) yang memutuskan bahwa pemerintah dan rakyat wajib bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial kemasyarakatan, demi keutuhan NKRI. Secara khusus, PBNU mengajar warga NU dan rakyat Indonesia jihad melestarikan lingkungan (*jihad bi'ah*) dengan tetap berpedoman pada kaidah *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Semua ini sebagai bentuk cinta tanah air dan menjaga jati diri bangsa tercinta.

Teladan nyata sebenarnya sudah dipraktikkan oleh KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam sejarahnya hidupnya, Kiai Hasyim sangat gemar bercocok tanam serta menganjurkan warga NU dan masyarakat untuk bercocok tanam. Bagi Kiai Hasyim, cocok tanam adalah pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun tidak secara verbal bicara lingkungan hidup, tetapi gerakan nyata Kiai Hasyim sangat jelas sebagai wujud komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus sebagai lahan penghidupan warga. Dengan bercocok tanam, Kiai Hasyim dan para santrinya bisa mandiri, bisa membantu sesama, sekaligus menjaga kelestarian alam.

Keteladanan yang sama dijalankan KH Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU 1999-2014. Dikenal sebagai kiai yang teguh menjaga prinsip dan progresif memberdayakan masyarakat, Kiai Sahal sangat peduli dengan lingkungan. Bagi Kiai Sahal (1988), keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup – bahkan seluruh aspek kehidupan manusia- merupakan kunci kesejahteraan. Kenyataan di mana-mana menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya. Ini akibat dari kecenderungan untuk cepat mencapai kepuasan lahiriah, tanpa mempertimbangkan disiplin sosial, dan tanpa memperhitungkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan yang akan menyulitkan generasi berikutnya.

Bagi Kiai Sahal, pesantren harus hadir secara nyata bagi kelestarian lingkungan hidup. Karena hidup bersama dengan denyut nadi masyarakat, pesantren tak boleh abai dengan kondisi lingkungannya. Pesantren harus bertanggung jawab dengan meningkatkan pribadinya untuk memusatkan dirinya pada pewarisan bumi (alam) dalam rangka ibadah yang sempurna.

Hidup sederhana

Perjuangan pertama-tama yang harus dilakukan dalam jihad melestarikan lingkungan, bagi Gus Mus, adalah hidup sederhana. Hidup berlebih-lebihan adalah pangkal utama kerusakan, termasuk dalam lingkungan hidup. Ini ditujukan buat semuanya, ya warga

NU, para pejabat, termasuk ibu-ibu Rembang yang berjuang menjaga pegunungan Kendeng Rembang sampai demonstrasi di depan Rektorat UGM, 20 Maret 2015, karena ada peneliti UGM yang bersaksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, bahwa kawasan karst di Kendeng layak ditambang.

Jihad melestarikan lingkungan, yang pertama-tama dijalankan dengan hidup sederhana, harus terus disuarakan kaum muda NU, khususnya para pemimpin muda NU baik di GP Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, PMII, dan KMNU. (Muhammadun, aktif di LTN PWNU DIY)

Jejak Tremas dalam Muktamar NU

Oleh A Muhammad

Sejak Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, secara berturut-turut penyelenggaraan muktamar NU selalu dilangsungkan di Surabaya hingga muktamar ketiga. Baru pada tahun 1929, atau muktamar keempat, hajatan yang waktu itu diselenggarakan tahunan itu berlangsung di luar Surabaya.

Semarang akhirnya ditunjuk menjadi kota penyelenggara muktamar NU, yang waktu itu mulai berkembang pesat dan diperhitungkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelihaihan diplomasi KH Wahab Chasbullah merayu Van Der Plas, *adviseur voor inlandsche Zaken* (menteri urusan pribumi), agar pelaksanaan muktamar dapat dilaksanakan di Semarang patut diacungi jempol, mengingat pada waktu yang bersamaan di Semarang sedang gentingnya pergolakan perlawanan kaum kiri.

Sukses muktamar di Semarang akhirnya menjadi awal ekspansi NU untuk mewartakan berdirinya jamiyah para kyai itu ke seluruh negeri dengan mengagendakan penyelenggaraan muktamar dari kota ke kota.

Satu tahun berikutnya kota Pekalongan mendapat penghormatan menjadi penyelenggara muktamar. Pilihan kota Pekalongan sebagai penyelenggara merupakan bentuk penghormatan atas peran Kakek Habib Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya yakni Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya, yang punya jasa besar atas berdirinya jamiyah terbesar di dunia tersebut.

Penyelenggaraan muktamar kelima ini semakin meriah dan terasa istimewa dengan banyaknya tokoh-tokoh besar terlibat dan menghadiri hajatan organisasi penjaga aqidah Ahlussunnah wal jamaah pimpinan KH Hasyim Asy'ari.

Sebagaimana disebutkan dalam buku *Sejarah KHA Wahid Hasyim* (Aboebakar Atjeh, 1958), tokoh-tokoh penting dan berpengaruh yang hadir dalam muktamar Ke-5 tersebut antara lain, dua tokoh muda kharismatik, KH. Abdul Wahid Hasyim dan KH. M. Iljas (menteri agama tahun 50-an), dan para ulama senior, seperti Kiai Faqih, Maskumambang Gresik, Kiai Munawiz, Kiai Muhammad Mudzakir, Kiai Abdullah alumnus (Al-Azhar) Mesir, Kiai M Said, Kyai Muhtadi Al-Hafidz, dan KHM Dimiyathi Abdullah Tremas, Pacitan.

Kehadiran KH M Dimiyathi Tremas, menjadi daya tarik tersendiri bagi para muktamirin, khususnya ulama-ulama senior maupun alumni pesantren Tremas yang hadir dari berbagai daerah.

Sebagaimana diketahui, pesantren Tremas pada waktu itu sedang berada di puncak masa keemasan di bawah asuhan Mbah Guru (KH M Dimiyathi, red). Jasa besar pesantren Tremas yang telah melahirkan ribuan ulama di seantero Nusantara ini menjadi kado terindah penyelenggaraan muktamar ke-5 dengan hadirnya KH M Dimiyathi, sahabat karib Rais Akbar Hadratussyekh Hasyim Asy'ari.

Bila pada masa pecah kongsi Masyumi-NU di awal 50-an hingga jatuhnya Orde Baru di akhir 90-an, pesantren Tremas memilih mengambil jarak dengan partai politik dan ormas-ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama, semua atas dasar pertimbangan menjaga *ukhuwah Islamiyah* dengan berpedoman pada kaidah *fiqhiyyah*, '*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*'.

Dalam buku *Bunga Rampai dari Tremas*, (A Muhammad, 2017) diutarakan panjang lebar, bahwa tidak mudah bagi Tremas memainkan perannya agar tetap akomodatif terhadap berbagai kepentingan, dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai pesantren yang memiliki reputasi luar biasa di masa lalu.

Terlebih kondisi politik era Orde Baru, mengambil posisi netral dari berbagai kepentingan ormas maupun orpol, menjadi sangat penting demi menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, pasca gerakan reformasi di pertengahan tahun 1998, Tremas dengan sigap mulai merespon berbagai kemungkinan untuk mengambil peran yang lebih luas dalam kancah politik kebangsaan maupun perannya sebagai agen perubahan.

Keterlibatan kembali beberapa anggota keluarga di dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama, menjadi langkah positif dalam upaya mengembalikan identitas Tremas, yang lebih dari empat dekade tidak maksimal mengambil peran di ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Kehadiran dan keterlibatan Mbah Guru Dimiyathi dalam gelaran muktamar NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930, layak dijadikan momentum penting sejarah keterlibatan Tremas dalam jamiyah NU.

Adalah sebuah keniscayaan bila salah satu cucu beliau, KH Luqman Harits Dimiyathi, kini terlibat aktif di jamiyah sebagai katib PBNU, yang saat ini sedang berjuang bersama elemen bangsa yang lain, menjaga dan merawat tradisi Islam Nusantara serta menjadi benteng kebinekaan Indonesia melawan segala bentuk rongrongan gerakan transnasional, yang berusaha mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

A Muhammad (adeahmad), Penulis buku Bunga Rampai dari Tremas, CEO Yayasan Islam Al-Anis, Kartasura, Sukoharjo.

(Zaenal Faizin/Muiz)

Kegembiraan Muktamar Ke-33 NU

Oleh Candra Malik

Kisah menghadiri Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, 1-5 Agustus 2015, saya mulai dari cerita perjumpaan dengan Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia dan Selandia Baru, Prof KH Nadirsyah Hosen, di sebuah rumah persembunyiannya di Tambak Beras. Guru besar hukum Universitas Monash, Melbourne ini mengaku sengaja menghilang saat para pengurus cabang istimewa dari berbagai negara lainnya mencarinya. Tapi, Gus Nadir, begitu ia disapa, baru saja kehilangan.

“Saya kehilangan hak suara, Mbah,” kata Gus Nadir. Satu catatan kecil, ia memang memanggil saya dengan sebutan Mbah, ketika yang lain ada yang memanggil saya Gus. “Kok bisa, Gus?” tanya saya. Ternyata, dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, Gus Nadir gagal mendapatkan kartu peserta meski telah memenuhi persyaratan beberapa pekan sebelumnya dan rela mengantri berjam-jam bersama para kiai, gus, dan pengurus NU dari berbagai penjuru Indonesia dan luar negeri lainnya.

Soal mengantri ini, saya mendapat kisah kesetiaan yang luar biasa seorang anggota Banser terhadap tata tertib -- yang berlaku juga dalam menghadapi seorang gus. “Saya ini Gus!” serunya kepada anggota Banser itu. Mungkin dia lelah. Tapi, anggota Banser itu pun pasti juga capek. “O, *sampeyan* salah tempat. Di sini banyak Gus dan Kiai. Bukan cuma *sampeyan*. *Sepurone sing kathah* (mohon maaf, red).” Namun, kegembiraan suasana muktamar tidak hanya sampai di situ. Gus Nadir pun mengalami kelucuan yang sama menyenangkannya ketika mengantri.

“Saya dari PCI NU Australia,” ungkap Gus Nadir. Petugas registrasi mengecek database peserta tapi tidak berhasil menemukan data yang ia cari. “Tidak ada NU Cabang Australia,” sergahnya.

Wah, Gus Nadir yang rais syuriyah PCI NU ANZ (Australia-New Zealand) kaget: bagaimana bisa database registrasi “menghapus” PCI yang ia pimpin? Tapi Gus Nadir masih bersabar. “Coba dilihat, kalau NU Cabang New Zealand ada atau tidak?” pintanya. Petugas ini mengulik data lagi. “Tidak ada. Yang ada NU Cabang Selandia Baru!” Ah, Nahdliyin sekali petugas registrasi yang teguh menjaga tata tertib ini. Jika tidak ada dalam data, maka tidak ada, itu prinsip.

Tapi, datang dengan dua kawan lain, jauh-jauh dari Melbourne, Gus Nadir tak mau patah arang. Ia merajuk lagi. “*Alhamdulillah*. Iya, benar, itu cabang yang saya pimpin. Selandia Baru itu ya terjemahan dari New Zealand itu. New itu Selandia, Zealand itu Baru,” papar Gus Nadir. “O, begitu ya? Ada kalau begitu, ada,” tukas petugas registrasi. Gus Nadir lega. Tapi, ia masih harus bersabar. Sebab, meski mencetak nama Gus Nadir dan cabang NU-nya, petugas registrasi ini memberi label Peninjau, bukan Peserta, pada kartu *muktamirin* yang diserahkannya kepada profesor ahli ushul fiqh dan fiqh, putra mendiang Prof KH Ibrahim Hosen ini.

“Ya sudahlah, Gus. Meski tidak punya hak suara, tapi kan masih punya hak bersuara,” ujar saya mencoba untuk menenangkan Beliau. Jadilah kami kemudian lebih aktif di luar arena muktamar, antara lain ziarah, sowan kiai, berbicara dalam forum-forum seminar dan diskusi, serta silaturahmi dengan muktamirin lainnya. Kami berdua kemudian juga bertemu KH Luqman Hakim, pemimpin redaksi Majalah *Cahaya Sufi*, dalam Seminar Nasional dan Diskusi Tasawuf di Institut Agama Islam Bani Fatah, Tambak Beras.

Saya melihat beraneka kegembiraan dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang. Dinamika sidang pleno mengenai tata tertib yang berlangsung sejak hari kedua muktamar, saya lihat sebagai konsistensi para kiai dan gus dalam menjaga tata tertib. Jika beliau-beliau saja tidak teguh dalam mengawal tata tertib, bagaimana dengan para santri? Kaum muda NU yang mempunyai kegembiraannya sendiri dalam suasana muktamar, dengan menyelenggarakan Musyawarah Besar Kaum Muda NU di Tambak Beras, 2-3 Agustus 2015, juga tak melepas pandangan mereka dalam mengikuti perkembangan

mutakhir di arena muktamar. Pun demikian para penyelenggara kegiatan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan muktamar.

Saya melihat Gus Nuril Arifin, Panglima Pasukan Berani Mati di era Presiden KH Abdurrahman Wahid, melenggang tenang ke belakang dari arah depan panggung utama di arena muktamar ketika tak mendapatkan kursi dalam malam pembukaan yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Padahal, ia bahkan memiliki dua undangan VVIP. Esoknya, saya melihat Gus Nuril duduk santai sambil merokok di Masjid Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya bertemu Beliau ketika jalan kaki menuju lokasi Pidato Kebudayaan oleh KH Husein Muhammad di kawasan Masjid Ulul Albab, di dekat Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng.

“Wah, ini. Sufi yang satu ini juga jalan terus,” begitu seloroh Gus Nuril kepada saya. Tak saya lihat ada kerisauan di wajahnya meski pemberitaan tentang suasana muktamar cenderung negatif hingga hari itu. Bertemu lagi dengan KH Luqman Hakim, pada Minggu malam, 2 Agustus, kali ini di rumah Gus Reza, di Kwaron, Tebu Ireng, saya juga tidak melihat kegelisahan di wajah Beliau. Justru Kiai Luqman asyik menceritakan kehidupan KH Wahid Hasyim -- yang diam-diam bersekolah di Surabaya tiga hari dalam sepekan dan empat hari belajar kepada Kiai Ihsan Jampes di Kediri; Mbah Hayat Nganjuk yang jadzab tapi sangat dihormati KH As’ad Syamsul Arifin, Mbah Ahmad Rifa’i yang mendirikan Jam’iyah Rifa’iyah, dan Mbah Jalil yang menyembunyikan kitab hakikat di atap rumahnya dan melarang siapa pun membacanya.

Kang Ahmad Tohari, sastrawan yang menulis novel berjudul *Ronggeng Dukuh Paruk*, yang hadir pula di rumah Gus Reza, berpesan bahwa NU harus melahirkan penulis-penulis besar. “Ada Gus Dur yang tidak tergantikan. Dan ada saya, yang harus ada yang menggantikan,” kata Ahmad Tohari yang kini berusia 67 tahun. “Terus menulis, Candra. Saya senang kita juga sudah memiliki Binhad Nurrohmat dan Faisal Kamandobat. Tapi, harus lahir lebih banyak penulis dari kalangan Nahdliyin,” pesannya. Kang Tohari menularkan

kegembiraan menjadi penulis yang nahdliyin kepada kami, malam itu, dalam kehangatan kopi, tembakau, spiritualitas, dan sastra.

Saya melihat banyak kegembiraan dalam suasana muktamar. Kiai Zubaidah, yang akrab disapa Cak Idah, pengasuh Padepokan Sawung Nalar, Wajak, Malang, yang merehabilitasi korban narkoba, juga hadir dalam kongkow di rumah Gus Reza. Beliau, kata Kiai Luqman, adalah *rocker* yang hapal Al Qur'an. Cak Idah punya banyak cerita tentang Banser dan keyakinan. "Melatih Banser itu mudah karena mereka memiliki mental dan iman baja. Dibekali hizib dan wirid saja, mereka berani maju ke garda paling depan," kata Cak Idah. "Itulah yang tidak dimiliki organisasi massa lain di luar NU," sahut Kiai Luqman, yang lalu memuji ketaatan dan kepatuhan santri pada kiai.

"Gus Dur pernah ziarah ke makam Mbah Hayat yang *jadzab*. Selama dua jam ziarah, Gus Dur ngakak tidak berhenti-henti. Entah ngobrol apa dengan Mbah Hayat. Yang lebih lucu lagi, para pengantar Gus Dur juga ikut tertawa tidak berhenti-henti," sambung Kiai Luqman. Itulah kegembiraan-kegembiraan yang barangkali tidak dimengerti oleh selain Nahdliyin. Kegembiraan diembuskan pula pada malam pembukaan muktamar oleh Gus Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, Ketua Panitia Lokal Muktamar 33 NU. Ia banyak berkelakar dalam berpidato.

Yang gara-gara ia terus membanyol, Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo sampai-sampai dalam pidatonya meminta maaf tidak bisa mengontrol Gus Ipul. "Kalau Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur, saya masih bisa mengontrol. Kalau Gus Ipul sebagai Ketua IGGI, mohon maaf, saya tidak bisa apa-apa. IGGI adalah Ikatan Gus-Gus Indonesia," ujar Pakde Karwo, yang ternyata ikut membanyol. Satu lawakan Gus Ipul yang mungkin tidak orisinal namun kontekstual adalah Muktamar ke-33 NU di Jombang disemarakkan oleh puluhan ribu Hadirin dan Hadirat (dibaca: Hadiroh). "Hadir IN, yang di dalam. Dan, hadir OUT, yang di luar," seloroh Gus Ipul, dan semua tertawa.

Nah, rupanya ada saja yang ingin ikut terlibat dalam kegembiraan Nahdliyin dalam muktamar. Ada yang dengan menyemarakkan tema Ahwa (*Ahlul Halli Wal Aqdi*/musyawarah mufakat), ada yang meramaikan mekanisme registrasi yang dialihkan menjadi manual sejak database *error*, ada yang meneriakkan isu politik uang, ada pula yang mulai menyerukan untuk kembali ke tema besar “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Nusantara dan Dunia”, ada yang ikut menelusupkan partai politik dan kepentingannya, pun ada pula yang mulai menggoyang-goyang ideologi *Ahlussunnah wal jama’ah*.

Ya, Muktamar Nadhlatul Ulama memang kegembiraan bagi siapa saja, bukan hanya bagi nahdliyin. Saya menjadi teringat kata-kata mendiang Idris Sardi yang bahkan bergembira dan bersyukur terhadap pembencinya yang terus-menerus memfitnahnya. “Saya wajib bersyukur karena bahkan telah membuat gembira pembenci saya yang pasti bergembira ketika menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap saya,” jelasnya. Ya, selain *muktamirin* dan *muktamirat*, Muktamar ke-33 NU di Jombang ini juga disemarakkan oleh kegembiraan *muktamiris* dan *muktamarah*. Semua berjalan gembira-gembira saja. [*]

Candra Malik, praktisi Tasawuf yang bergiat dalam kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan; Peninjau dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang.

Tok! Mukhtamar Ke-34 NU Tetap Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan gelaran Mukhtamar ke-34 NU di Provinsi Lampung diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021. Ketetapan ini berdasarkan keputusan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jakarta pada 26 September 2021 lalu.

Ketetapan diputuskan ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H Ahmad Helmy Faishal Zaini.

“Sehubungan dengan kebijakan penarikan pemberlakuan PPKM level 3, terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pada masa Nataru (Natal 2021 dan Tahun Baru 2022) maka dengan ini PBNU memberitahukan bahwa penyelenggaraan Mukhtamar ke-34 adalah sepenuhnya sebagaimana keputusan Konferensi Besar NU pada 26 September 2021. Adapun waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 18-20 Jumadil Ula 1443 Hijriyah atau 23-25 Desember 2021 Masehi di Lampung,” ungkap Kiai Said Aqil Siroj membacakan keputusan, di lantai 8 Gedung PBNU Jakarta, pada Selasa (7/12/2021).

Sementara itu, Kiai Miftachul Akhyar mengucap syukur. Ia mengatakan setelah masing-masing pihak melakukan ijtihad tetapi akhirnya bertemu. Pertemuan ini bertujuan demi maslahat, demi Nahdlatul Ulama, demi agar para pendiri NU gembira melihat para pengurus PBNU di saat amanat ini diemban.

“Bersyukur kepada Allah atas anugerah yang berlimpah ini. dengan tadi sudah disampaikan *ikhbar* tentang pelaksanaan Mukhtamar yang akan dilaksanakan pada 23-25 Desember tahun ini, saya kira sudah selesai semuanya,” kata Kiai Miftah.

Sebelumnya, Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, NU terus menjadi pilar pemersatu bangsa, penyangga utama NKRI, serta pengayom umat dan bangsa.

Karenanya, NU akan berkomitmen akan terus menjaga agar NU tetap terdepan menjadi contoh terbaik bagi membangun *ukhuwah islamiah, wathaniyah, basyariyah*, terlebih *ukhuwah nahdliyah*.

“Izinkan tadi hasil rembug rais aam, katib aam, ketum, sekjen, dan para kiai dan *masyayikh* menyampaikan satu *ikhbar* sehingga wacana muktamar maju-mundur selesai sudah,” jelas Sekjen.

Sebelum keputusan itu dibacakan, Rais Syuriah PBNU KH Manarul Hidayat dan KH Ahmad Kafabihi Mahrus melantunkan berbagai shalawat dna pujian-pujian yang diikuti oleh seluruh hadirin.

Pertemuan ini dihadiri oleh para ketua dan rais syuriah PWNU seluruh Indonesia, pengurus harian tanfidziyah dan syuriah PBNU, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta Panitia OC dan SC Muktamar ke-34 NU.

Pewartu: Aru Lego Triono
Editor: Fathoni Ahmad



Diterbitkan oleh:
Numedia Digital Indonesia

Jl Kramat Raya 164
Jakarta Pusat 10430
Telp (021) 3914013,
fax (021) 3914014